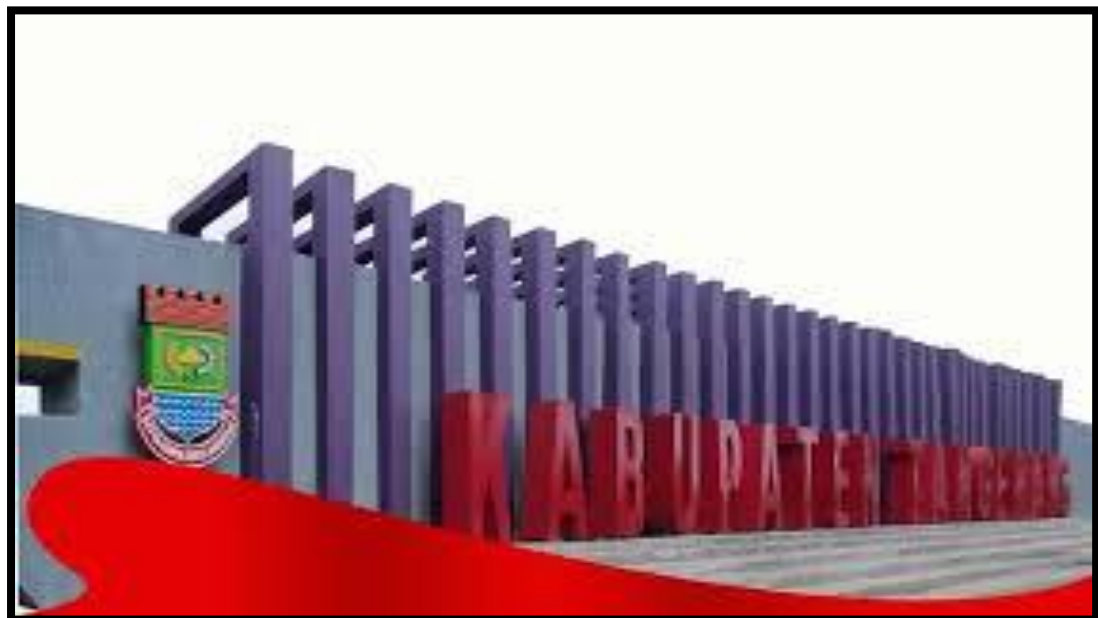


**RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2023**



**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN TANGERANG
TAHUN 2022**



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH

Komplek Perkantoran Tigaraksa Telp. 5994839, 5994870 Fax 5994840
Tigaraksa – Tangerang 15720

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANGERANG
NOMOR : 900/ -Setwan

TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERUBAHAN SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2023

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang Tahun 2023 merupakan Rencana Kerja Tahunan SKPD sebagai penjabaran pentahapan pelaksanaan program dan kegiatan dari Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2023;
- b. bahwa Rencana Kerja (RENJA) Perubahan sebagaimana huruf a tersebut diatas, merupakan pedoman bagi seluruh jajaran organisasi di lingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang dalam merumuskan dan melaksanakan program dan kegiatan;
- c. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi penyusunan Renja Perubahan Sekretariat DPRD maka dipandang perlu mementuk Tim Penyusun Renja DPRD Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah(Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
5. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Nasional;
9. Permendagri Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dilingkungan Pemerintah Daerah/ Kementerian Dalam Negeri;
10. Permendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
11. Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Tangerang;
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 sebagaimana diubah oleh Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang
14. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang;

Memperhatikan : 1. Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023
2. Keputusan DPRD No. 188.4/ Tentang RENJA DPRD Kabupaten Tangerang Tahun 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang Tahun 2023 sebagai berikut :

- | | |
|--|------------------|
| 1. Sekretaris DPRD | Penanggung Jawab |
| 2. Kepala Bagian Program dan Keuangan | Ketua |
| 3. Kepala Bagian Umum | Wakil Ketua |
| 4. Kepala Bagian Persidangan dan Per UU | Wakil Ketua |
| 5. Kepala Bagian Fasilitasi dan Pengawasan | Wakil Ketua |
| 6. Kasubag Perencanaan dan Penganggaran | Sekretaris |
| 7. Kasubag Verifikasi | Anggota |
| 8. Kasubag Akuntansi dan Pelaporan | Anggota |
| 9. Kasubag Umum dan Kepegawaian | |
| 10. Kasubag RT dan Perlengkapan | Anggota |
| 11. Kasubag Humas, Protokol dan Publikasi | Anggota |
| 12. Kasubag Kajian Per UU | |
| 13. Kasubag Persidangan dan Risalah | Anggota |
| 14. Kasubag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan | Anggota |
| 15. Kasubag Pengawasan dan Kerja Sama. | Anggota |

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tigaraksa
Pada Tanggal : Juli 2023

**SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TANGERANG**

NENENG ALMIRAH, SE
NIP. 197005121997032003



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH

Komplek Perkantoran Tigaraksa Telp. 5994839, 5994870 Fax 5994840

Tigaraksa – Tangerang 15720

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANGERANG
NOMOR : 900/ -Setwan

TENTANG
RENCANA KERJA PERUBAHAN SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2023

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang Tahun 2023 merupakan Rencana Kerja Tahunan SKPD sebagai penjabaran pentahapan pelaksanaan program dan kegiatan dari Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2023;
- b. bahwa Rencana Kerja (RENJA) Perubahan sebagaimana huruf a tersebut diatas, merupakan pedoman bagi seluruh jajaran organisasi di lingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang dalam merumuskan dan melaksanakan program dan kegiatan;
- c. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi dari pelaksanaan pedoman tersebut sebagaimana pada huruf (b) diatas, maka dipandang perlu Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang Tahun 2023 untuk ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 437);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Nasional;
12. Permendagri Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dilingkungan Pemerintah Daerah/ Kementerian Dalam Negeri;
13. Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Permendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Tangerang;
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 sebagaimana diubah oleh Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang
17. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang;
18. Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023.

Memperhatikan : 1. Keputusan DPRD No. 01 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Tangerang.
2. Keputusan DPRD No. 188.4/ Tentang RENJA DPRD Kabupaten Tangerang Tahun 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Tangerang tentang Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2023.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Rencana Strategis adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, program, kegiatan yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai;
- b. Rencana Kerja (RENJA) Perubahan adalah suatu dokumen perencanaan jangka pendek untuk periode waktu satu tahun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. Perangkat Daerah (PD) adalah unit kerja organisasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari organisasi induk Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh organisasi;

- e. Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik;
- f. Tujuan adalah sesuatu sebagai penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu;
- g. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu;
- h. Kebijakan adalah ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman atau petunjuk pelaksanaan;
- i. Program adalah kumpulan dari kegiatan-kegiatan yang mempunyai arah, tujuan dan sasaran yang sama dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan;
- j. Kegiatan adalah aktivitas rutin sebagai bagian dari tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh organisasi dalam rangka mewujudkan target dan sasaran program.

Pasal 2

Pelaksanaan lebih lanjut dari Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang Tahun 2023 dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKAP) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA).

Pasal 3

Sistematika penulisan dari Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Perubahan Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2022
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB IV	PROGRAM KEGIATAN DAN PENDANAAN
BAB V	PENUTUP

Pasal 4

Isi serta uraian rincian Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tigaraksa
Pada Tanggal : Juli 2023

**SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TANGERANG**

NENENG ALMIRAH, SE
NIP. 197005121997032003



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Komplek Perkantoran Tigaraksa Telp. 5994839, 5994870 Fax 5994840

Tigaraksa – Tangerang 15720

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan kepada kami, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2023. Rencana Kerja ini merupakan Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud penjabaran dari Rencana Strategis yang ditetapkan oleh satuan unit organisasi.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan merupakan bentuk komitmen dan sebagai bagian dari upaya untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Dalam Rencana Kerja yang kami susun ditetapkan pula pencapaian kinerja tahunan yang diukur berdasarkan indikator kinerja pada setiap tingkat sasaran.

Target kinerja merupakan kuantifikasi dari seluruh pengukuran indikator kinerja, dimana hasil akhir dari proses pengukuran tersebut dapat menunjukkan keberhasilan organisasi pada setiap akhir periode pelaksanaan.

Dokumen Rencana Kerja Perubahan ini merupakan salah satu dari komponen akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan kemudian diakhiri dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Kami menyadari bahwa hasil penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini masih jauh dari sempurna baik dari penyajian maupun cakupan informasi yang diharapkan. Untuk itu kritik dan saran dari para *stakeholder* sangat kami harapkan untuk perbaikan pada penyusunan Rencana Kerja yang akan datang.

Kami berharap Rencana Kerja Perubahan yang kami susun, dapat dijadikan sebagai acuan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam merumuskan kegiatan, serta menilai tingkat pencapaian kinerja organisasi.

Tigaraksa, Juli 2023

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TANGERANG

NENENG ALMIRAH, SE
NIP. 197005121997032003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	
KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD	
DAFTAR ISI	
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja	4
1.5 Sistematika Penulisan.....	17
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2021	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022.....	19
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD	33
2.3. Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	43
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	44
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	55
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	56
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja	56
3.3 Program dan Kegiatan	57
3.4. Target Kinerja Program dan Kegiatan	67
BAB IV : P E N U T U P	77

LAMPIRAN



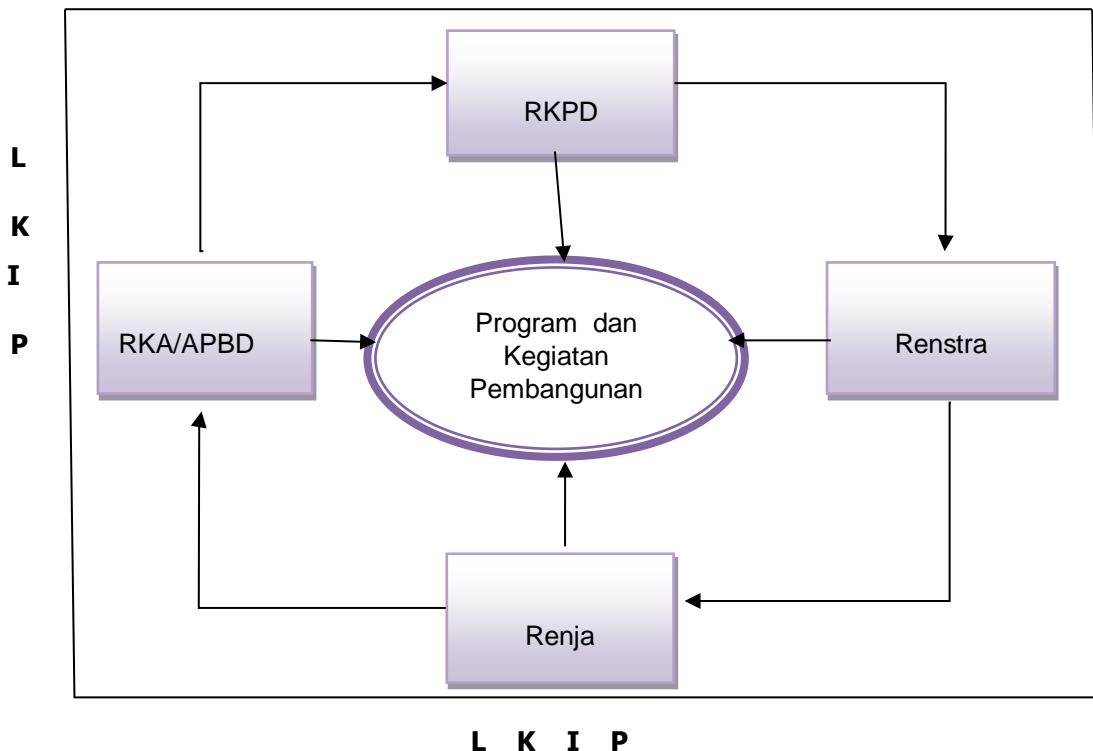
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD), merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan lanjutan PD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.



Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Tangerang, Rencana Kerja



Perubahan Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan yang wajib dibuat oleh seluruh Perangkat Daerah.

Sebagai Dokumen Perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun, Renja perubahan PD merupakan pedoman pelaksanaan perencanaan dan pengendalian dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahunan PD guna mencapai visi yang telah ditetapkan dan sebagai acuan dasar dalam melaksanakan penilaian kinerja instansi pemerintah.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
13. Permendagri Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dilingkungan Pemerintah Daerah/Kementerian Dalam Negeri;
14. Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Permendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
16. Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2023;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Tangerang;
18. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Kegiatan Pertemuan/Rapat Diluar Kantor;
20. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang;
21. Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang Tahun 2019–2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2023, dimaksudkan untuk melanjutkan pelaksanaan dokumen perencanaan tahunan Sekretariat DPRD, sebagai implementasi dari pentahapan Rencana Strategis yang memuat tentang kumpulan kegiatan prioritas Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk periode satu tahun anggaran.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini adalah :

1. Sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
2. Sebagai acuan Sekretariat DPRD dalam melaksanakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);



3. Sebagai alat kontrol organisasi dalam mengendalikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan;
4. Sebagai tolok ukur keberhasilan PD dalam mengemban visi dan misi pemerintah daerah;
5. Sebagai acuan dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
6. Memberikan arah dan pedoman kepada seluruh jajaran organisasi Sekretariat DPRD dalam pencapaian visi dan misi;
7. Adanya Renja Perubahan diharapkan dapat memperbaiki kinerja dan motivasi seluruh jajaran organisasi Sekretariat DPRD yang benar-benar terarah dalam pencapaian hasil dan target kinerja;
8. Diharapkan Renja Perubahan dapat dijadikan tolok ukur kinerja dan evaluasi secara obyektif sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

1.4. Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD

Berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya Pemerintah Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggara administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggara Administrasi keuangan DPRD;
- c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- d. Fasilitasi penyelenggaraan fungsi penganggaran, pengawasan dan pembentukan Peraturan Daerah oleh DPRD;
- e. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Dalam melaksanakan fungsinya Sekretariat DPRD mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Merumuskan program kerja, melaksanakan kebijakan strategis dan teknis fasilitasi pelaksanaan fungsi DPRD di bidang Legislasi, Penganggaran dan Pengawasan;
- b. Mengkoordinasikan fasilitasi pelaksanaan fungsi DPRD bidang Legislasi, Penganggaran dan Pengawasan;



- c. Membina, mengawasi, mengendalikan dan melaksanakan tugas kesekretariatan serta perencanaan dan keuangan;
- d. Mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan kepada bawahan sesuai tugas dan fungsinya;
- e. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan tenaga ahli fraksi;
- f. Mengevaluasi program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi lingkup Sekretariat DPRD;
- g. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi lingkup Sekretariat DPRD.

Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang teknis operasionalnya berada dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Sekretaris DPRD;
- b. Bagian Umum.
 1. Sub Bagian Tata Usaha Dan Kepegawaian.
 2. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
 3. Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi.
- c. Bagian Program dan Keuangan.
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran.
 2. Sub Bagian Verifikasi.
 3. Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan.
- d. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
 1. Sub Bagian Kajian Perundang-undangan.
 2. Sub Bagian Persidangan dan Risalah.
- e. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
 1. Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Aspirasi.
 2. Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan dan Kerja Sama.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

A. Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang

Bagian Umum berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD;

Bagian Umum mempunyai fungsi :



- a. Penyelenggaraan ketatausahaan Sekretariat DPRD;
- b. Pengelolaan kepegawaian Sekretariat DPRD;
- c. Penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
- d. Penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD;
- e. Penyelenggaraan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab DPRD;
- f. Penyelenggaraan hubungan masyarakat, protokol dan publikasi;
- g. Pengelolaan administrasi perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD.
- h. Penyelenggaraan bimbingan teknis pegawai Sekretariat DPRD;
- i. Pelaksanaan fasilitasi pelayanan kebutuhan kerja alat kelengkapan DPRD dan kesehatan DPRD;
- j. Pelaksanaan administrasi pendataan keanggotaan DPRD;
- k. Pengelolaan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
- l. Penyediaan fasilitasi fraksi DPRD.

Bagian Umum terdiri atas :

- Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian.
- Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
- Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi.

1). *Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian*

Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian umum.

Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan kegiatan tahunan Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
- b. Melaksanakan surat menyurat dan naskah dinas Sekretariat DPRD dan pimpinan DPRD;
- c. Melaksanakan kearsipan;
- d. Melaksanakan administrasi Sekretariat DPRD;
- e. Menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian;
- f. Menyiapkan bahan administrasi pegawai;
- g. Menyiapkan bahan administrasi pembuatan daftar urut kepangkatan dan formasi pegawai;
- h. Mengelola administrasi perjalanan dinas pegawai Sekretariat DPRD;



- i. Mempersiapkan, mengusulkan atau menyelenggarakan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai Sekretariat DPRD;
- j. Membagi tugas dan koordinasi dalam menyiapkan bahan dan menyusun pelaksanaan dan kearsipan serta perjalanan dinas pegawai Sekretariat DPRD kepada bawahan dilingkup sub bagian tata usaha dan kepegawaian;
- k. Membimbing pelaksanaan kegiatan kepada bawahan dilingkungan sub bagian tata usaha dan kepegawaian;
- l. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan kinerja bawahan dilingkup sub bagian tata usaha dan kepegawaian;
- m. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian tata usaha dan kepegawaian;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2). Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.

Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian umum.

Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan anggaran dan kegiatan tahunan Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
- b. Mengatur dan memelihara kebersihan kantor kompleks Sekretariat DPRD;
- c. Mengatur dan memelihara halaman dan taman dikomplek Sekretariat DPRD;
- d. Mengatur dan mengelola keamanan kompleks Sekretariat DPRD;
- e. Memfasilitasi penyiapan tempat dan sarana rapat dan pertemuan;
- f. Mengadakan barang dan jasa kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
- g. Mendistribusikan dan pengendalian bahan perlengkapan;
- h. Merencanakan pemeliharaan alat-alat perlengkapan;
- i. Menyediakan, mengurus, menyimpan serta mengeluarkan barang untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- j. Mengatur pemeliharaan dan pengelolaan bahan bakar kendaraan dinas Sekretariat DPRD;
- k. Mengatur penggunaan kendaraan dinas dan para pengemudi untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD
- l. Melaksanakan pemeliharaan sarana, prasarana dan gedung;



- m. Membagi tugas pelaksanakn kegiatan kerumahtangaan, pengadaan perlengkapan dan barang/aset daerah serta pemeliharaan peralatan/perengkapan kantor/gedung lingkup sub bagian rumah tangga dan perlengkapan;
- n. Membimbing pelaksanaan kegiatan sub bagian rumah tanggga dan perlengkapan kepada bawahan;
- o. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan kinerja bawahan dilingkup sub bagian rumah tangga dan perlengkapan;
- p. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian rumah tangga dan perlengkapan
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3). Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi.

Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian umum.

Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan kegiatan tahunan sub bagian humas, protokol dan publikasi;
- b. Merencanakan kegiatan DPRD;
- c. Menyusun bahan komunikasi dan publikasi;
- d. Merancang administrasi kunjungan kerja DPRD;
- e. Menyusun bahan keprotokolan pimpinan DPRD;
- f. Merencanakan keprotokolan pimpinan DPRD;
- g. Merancang administrasi kunjungan kerja pimpinan DPRD;
- h. Memfasilitasi dalam penerimaan tamu kunjungan kerja;
- i. Mengelola administrasi perjalanan dinas daerah pimpinan dan anggota DPRD;
- j. Memfasilitasi layanan kebutuhan kerja alat kelengkapan DPRD;
- k. Memfasilitasi pelayanan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD;
- l. Melakukan administrasi pendataan keanggotaa DPRD;
- m. Mengelola administrasi keanggotaat DPRD;
- n. Membagi tugas dan koordinasi dalam menyiapkan bahan dan penyusunan pelaksanaan kegiatan humas, protokol dan publikasi;
- o. Membimbing pelaksanaan kegiatan kepada bawahan dilingkup sub bagian humas, protokol dan publikasi;
- p. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan kinerja bawahan dilingkup sub bagian



- humas, protokol dan publikasi;
- q. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian humas, protokol dan publikasi;
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Bagian Program dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang

Bagian Program dan Keuangan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretariat DPRD.

Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- b. Pengevaluasian bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- c. Pemverifikasian perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD;
- d. Pemverifikasian perencanaan perlengkapan Sekretariat DPRD;
- e. Penyelenggaraan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
- f. Pengelolaan keuangan pimpinan, anggota dan Sekretariat DPRD;
- g. Pengelolaan koordinasi anggaran Sekretariat DPRD;
- h. Pemverifikasian pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;
- i. Pengevaluasian laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;
- j. Pelaksanaan koordinasi dan evaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD;
- k. Penyusunan laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD.

Bagian Keuangan terdiri atas :

- Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran.
- Sub Bagian Verifikasi.
- Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan.

1). Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran.

Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian program dan keuangan.

Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan kegiatan tahunan sub bagian perencanaan dan penganggaran;
- b. Menyusun bahan perencanaan;
- c. Menyusun RKA dan DPA baik murni maupun perubahannya;
- d. Merencanakan perencanaan kebutuhan rumah tangga DPRD;



- e. Merencanakan kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
- f. Membagi tugas dan koordinasi dalam menyiapkan bahan dan menyusun pelaksanaan kegiatan perencanaan dan penganggaran;
- g. Membimbing pelaksanaan kegiatan kepada bawahan dilingkup sub bagian perencanaan dan penganggaran;
- h. Mengevaluasi kegiatan dan kinerja bawahan dilingkup sub bagian perencanaan dan penganggaran;
- i. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian perencanaan dan penganggaran;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2). Sub Bagian Verifikasi

Sub Bagian Verifikasi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian program dan keuangan.

Sub Bagian Verifikasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan kegiatan tahunan sub bagian verifikasi;
- b. Merencanakan pemverifikasian keuangan;
- c. Memverifikasi pertanggungjawaban keuangan;
- d. Mengkoordinasikan kepada PPTK, bendahara dan pembantu PPK KD untuk pengajuan SPP dan SPM-UP/SMP-GU/SPM-TU/SPM-LS;
- e. Memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga;
- f. Memverifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
- g. Membagi tugas dan koordinasi dalam menyiapkan bahan dan menyusun pelaksanaan kegiatan verifikasi;
- h. Membimbing pelaksanaan kegiatan kepada bawahan dilingkup sub bagian verifikasi;
- i. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan kinerja bawahan dilingkup sub bagian verifikasi;
- j. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian verifikasi;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan langsung terkait dengan tugas dan fungsinya;

2). Sub Bagian Verifikasi

Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab



kepada kepala bagian program dan keuangan.

Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan kegiatan tahunan sub bagian akuntansi dan pelaporan;
- b. Merencanakan penatausahaan keuangan;
- c. Menyusun pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
- d. Mengkoordinasikan kepada PPTK dan bendahara dalam melaksanakan belanja dan pertanggungjawaban keuangan;
- e. Melaksanakan pengelolaan keuangan pimpinan, anggota dan Sekretariat DPRD;
- f. Menganalisa laporan keuangan;
- g. Menganalisa laporan kinerja;
- h. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
- i. Membagi tugas dan koordinasi dalam menyiapkan bahan dan menyusun pelaksanaan kegiatan akuntansi dan pelaporan;
- j. Membimbing pelaksanaan kegiatan kepada bawahan dilingkup sub bagian akuntansi dan pelaporan;
- k. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan kinerja bawahan dilingkup sub bagian akuntansi dan pelaporan;
- l. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian akuntansi dan pelaporan;
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan langsung terkait dengan tugas dan fungsinya;

C. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang.

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretariat DPRD.

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan kajian perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
- c. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan naskah akademik dan draft rancangan peraturan daerah inisiatif;
- d. Pelaksanaan verifikasi, evaluasi dan analisis produk peraturan perundang-undangan;
- e. Pengumpulan bahan penyiapan draft rancangan peraturan daerah inisiatif;
- f. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan persidangan;
- g. Penyusunan risalah rapat;



- h. Pelaksanaan koordinasi pembahasan rancangan peraturan daerah;
- i. Pelaksanaan verifikasi, koordinasi dan evaluasi daftar inventarisasi masalah
- j. Pelaksanaan verifikasi, koordinasi dan evaluasi risalah rapat.

Bagian Persidangan terdiri dari :

- Sub Bagian Kajian Perundang-undangan.
- Sub Bagian Persidangan dan Risalah.

1). *Sub Bagian Kajian Perundang-undangan*

Sub Bagian Kajian Perundang-undangan berkedudukan dan bertanggung jawab kepada kepala bagian persidangan dan perundang-undangan.

Sub Bagian Kajian Perundang-undangan mempunyai uraian tugas :

- a. Merencanakan kegiatan tahunan sub bagian kajian perundang-undangan;
- b. Melaksanakan kajian perundang-undangan;
- c. Membuat konsep bahan penyusunan naskah akademik;
- d. Menyusun bahan analisis produk penyusunan perundang-undangan;
- e. Membuat konsep bahan penyiapan draft peraturan inisiatif;
- f. Merancang bahan pembahasan peraturan daerah;
- g. Menyusun bahan daftar inventarisir masalah;
- h. Membagi tugas dan koordinasi dalam menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan kajian perundang-undangan;
- i. Membimbing pelaksanaan kegiatan kepada bawahan dilingkup sub bagian kajian perundang-undangan;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan kinerja bawahan dilingkup sub bagian kajian perundang-undangan;
- k. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian kajian perundang-undangan;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2). *Sub Bagian Persidangan dan Risalah*

Sub Bagian Persidangan dan Risalah berkedudukan dan bertanggung jawab kepada kepala bagian persidangan dan perundang-undangan.

Sub Bagian Persidangan dan Risalah mempunyai uraian tugas :

- a. Merencanakan kegiatan tahunan sub bagian persidangan dan risalah;
- b. Merencanakan program serta jadwal rapat dan sidang;
- c. Menyusun risalah, notulen catatan rapat;



- d. Menyiapkan materi/bahan rapat DPRD;
- e. Memfasilitasi rapat DPRD;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan rencana kerja DPRD;
- g. Menyediakan fasilitas fraksi DPRD yang meliputi sarana, prasarana makanan dan minuman serta gaji staf fraksi;
- h. Menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli;
- i. Membagi tugas dan koordinasi dalam menyiapkan bahan dan menyusun pelaksanaan kegiatan persidangan dan risalah;
- j. Membimbing pelaksanaan kegiatan kepada bawahan dilingkup sub bagian persidangan dan risalah;
- k. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan kinerja bawahan dilingkup sub bagian persidangan dan risalah;
- l. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian persidangan dan risalah;
- m. Membimbing pelaksanaan kegiatan kepada bawahan lingkup Sub Bagian Alat Kelengkapan DPRD;
- n. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan Alat Kelengkapan DPRD;
- o. Mengelola administrasi perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD, fasilitasi layanan kebutuhan kerja Alat Kelengkapan DPRD, fasilitasi pelayanan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD dan pendataan keanggotaan DPRD ;
- p. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Alat Kelengkapan DPRD;
- q. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Alat kelengkapan DPRD;
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

D. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang

Bagian Penganggaran dan Pengawasan berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.

Bagian Penganggaran dan Pengawasan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan KUA PPAS/kebijakan umum perubahan anggaran PPAS perubahan;
- b. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan APBD/APBD perubahan;
- c. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan rancangan peraturan



- daerah pertanggung jawaban APBD;
- d. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan laporan semesteran pertama dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya;
 - e. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan laporan keuangan pertanggung jawaban Bupati;
 - f. Penyusunan bahan pembahasan perhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - g. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi Aspirasi Masyarakat;
 - h. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi perumusan rapat dalam rangka pengawasan;
 - i. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
 - j. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
 - k. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pengawasan pelaksanaan kebijakan;
 - l. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi penyusunan pokok pikiran DPRD;
 - m. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi persetujuan kerja sama daerah;
 - n. Pelaksanaan fasilitasi bimbingan teknis/peningkatan kapasitas DPRD;

Bagian Penganggaran dan Pengawasan terdiri dari :

- Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Aspirasi;
- Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan dan Kerja Sama.

1). *Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Aspirasi*

Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Aspirasi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian fasilitasi penganggaran dan aspirasi.

Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Aspirasi mempunyai uraian tugas :

- a. Merencanakan kegiatan tahunan sub bagian fasilitasi penganggaran dan aspirasi;
- b. Merencanakan pembahasan KUA PPAS/kebijakan umum perubahan perubahan anggaran PPAS perubahan;
- c. Menyusun bahan pembahasan APBD/APBD perubahan;
- d. Menyusun bahan pembahasan rancangan peraturan daerah pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;
- e. Menyusun bahan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis 6



(enam) bulan berikutnya;

- f. Menyusun bahan pembahasan laporan keterangan pertanggung jawab Bupati;
- g. Menyusun bahan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- h. Merencanakan kegiatan rapat dengar pendapat/dialog dengan pejabat pemerintah dan masyarakat;
- i. Memfasilitasi reses DPRD;
- j. Menganalisis data/bahan dukungan jaringan aspirasi;
- k. Menyusun pokok pikiran DPRD;
- l. Membagi tugas dan koordinasi dalam menyiapkan bahan dan menyusun pelaksanaan kegiatan fasilitasi penganggaran dan aspirasi;
- m. Membimbing pelaksanaan kegiatan kepada bawahan dilingkup sub bagian fasilitasi penganggaran dan aspirasi;
- n. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan kinerja bawahan dilingkup sub bagian fasilitasi penganggaran dan aspirasi;
- o. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian fasilitasi penganggaran dan aspirasi;
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2). *Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan dan Kerja Sama.*

Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan dan Kerja Sama berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian fasilitasi penganggaran dan aspirasi.

Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan dan Kerja Sama mempunyai uraian tugas :

- a. Merencanakan kegiatan tahunan sub bagian fasilitasi pengawasab dan kerja sama;
- b. Mengkaji ulang rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
- c. Merancang bahan rapat internal DPRD;
- d. Menganalisis bahan dalam pelaksanaan penegakan kode etik;
- e. Menganalisis bahan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
- f. Menyusun bahan pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- g. Melaksanakan kerja sama Sekretariat DPRD dan DPRD;
- h. Mengelola administrasi perjalanan dinas dalam daerah pimpinan dan anggota DPRD;



- i. Pelaksanaan fasilitasi bimbingan teknis/peningkatan kapasitas DPRD;
- j. Membagi tugas dan koordinasi dalam menyiapkan bahan dan menyusun pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengawasan dan kerja sama;
- k. Membimbing pelaksanaan kegiatan kepada bawahan dilingkup sub bagian fasilitasi pengawasan dan kerja sama;
- l. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan kinerja bawahan dilingkup sub bagian fasilitasi pengawasan dan kerja sama;
- m. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian fasilitasi pengawasan dan kerja sama;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Sekretariat DPRD secara profesional sesuai dengan kebutuhan. Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang ditetapkan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang. Sedangkan mengacu pada Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD, Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administratif dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD secara teknis operasionalnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD sedangkan secara administrasi bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional, maka sebagai unsur pelayanan Sekretariat DPRD dituntut dapat melaksanakan perannya pada setiap fungsi, diantaranya :

1. Peran Setwan pada fungsi Legislasi.
 - Kajian perda.
 - Evaluasi terhadap penyiapan penyusunan rancangan perda.
 - Penyusunan propemperda.
 - Penyusunan reperda inisiatif.
 - Pembahasan raperda inisiatif dan eksekutif.



2. Peran Setwan pada Fungsi Budgeting.
 - Perencanaan Program.
 - Perencanaan Anggaran.
 - Pelaksanaan Anggaran.
3. Peran Setwan pada Fungsi Pengawasan.
 - Evaluasi Anggaran dan Kinerja PD oleh DPRD
 - Kajian Pelaksanaan Kebijakan.
 - Analisis Pengaruh Masyarakat atas kebijakan yang diterapkan oleh Kepala Daerah.
 - Dukungan Data.

Selain ketiga fungsi tersebut Sekretariat DPRD mempunyai peran lain yaitu :

1. Peran terhadap Alat Kelengkapan Dewan.
2. Peningkatan SDM.
3. Peningkatan Sarana dan Prasarana.
4. Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kesekretariatan.
5. Menjadi Publik Relation Kinerja DPRD.
6. Peningkatan Koordinasi Dengan PD atau Lembaga Terkait Lainnya.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
Mengemukakan pengertian renja, proses penyusunan renja, keterkaitan antara renja dengan dokumen RKPD, Renstra, Renja Kabupaten dan kaitannya dengan proses penyusunan RAPBD.
- 1.2. Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD serta yang dijadikan acuan dalam perencanaan dan penganggaran PD.
- 1.3. Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja.
- 1.4. Sistematika Penulisan



Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANGERANG.

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan capaian Renstra Sekretariat DPRD.
- 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD.
- 2.3. Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD.
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Telaahan terhadap kebijakan nasional yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD.
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD.
- 3.3. Program dan Kegiatan
Penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya.

BAB IV P E N U T U P.

**BAB II****EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2022**

Evaluasi Pelaksanaan Renja digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran target program dan kegiatan yang telah ditetapkan guna mewujudkan tujuan yang ditetapkan.

Evaluasi Renja dilakukan dengan menggunakan metode komparasi perbandingan, yaitu membandingkan antara rencana kerja dengan realisasi kinerja yang dicapai organisasi. Setelah itu, akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja yang terjadi serta tindakan perbaikan yang dilakukan dimasa yang akan datang.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD

Dalam rangka mengetahui tingkat capaian dari sasaran program dan kegiatan, maka setiap tahun dilakukan pengukuran capaian sasaran program dan kegiatan. Pengukuran pelaksanaan renja Setwan dilakukan pada pada fasilitasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang langsung mendukung tugas dan fungsi DPRD dan program penunjang pemerintah daerah kabupaten/kota. Pengukuran tingkat capaian sasaran program dan kegiatan tersebut dilakukan secara bertahap dari indikator kinerja, target dan capaian target sebagaimana tergambar dalam Matrik capaian indikator kinerja Tahun 2022.

Tabel 2.1
Capaian Indikator Kinerja

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian pada Tahun Ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Prosentasi Hasil Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Tepat Waktu				88,00	88,17	88,33	88,48	88,70	89,91	92,12	72,28	86,00		102,17	104,68	81,83	97,19	
2.	Nilai Evaluasi AKIP				70,94	71,25	71,75	72,10	72,55	80,32	80,35	81,92	72,45		113,22	112,77	114,17	100,48	

Capaian kinerja indikator Tahun 2022 seperti pada tabel diatas berdasarkan hasil monev triwulan IV atau pada akhir tahun pelaksanaan program dan kegiatan terhadap kinerja fasilitasi tugas dan fungsi dewan pada indikator Prosentase Hasil Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Tepat Waktu adalah 86,00% termasuk dalam predikat Baik.

Pencapaian 86,00% tersebut diperoleh dari program yang langsung mendukung kegiatan DPRD yaitu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan 8 kegiatan sebagai berikut :



Tabel 2.2
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Output/Target	Capaian Kinerja
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD			86%
	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Terlaksananya pembahasan dan pembentukan raperda	75%
	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Terlaksananya pembahasan dan penetapan rencana anggaran	83,33
	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Terselenggaranya pengawasan kinerja pemerintah	100
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Terlaksananya pemenuhan fasilitasi kapasitas DPRD	97,00
	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Terlaksananya penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	33,33
	Kegiatan Pelaksanaan Kode Etik	Terlaksananya penyusunan dokumen kode etik	100
	Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah	Terlaksananya komunikasi dan publikasi	100
	Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	Terlaksananya fasilitasi tugas DPRD	50,00

Capaian kinerja sebagaimana tabel diatas secara umum hampir seluruh kegiatan telah memenuhi pencapaian target kinerja namun demikian ada 3 kegiatan belum memenuhi target yaitu Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat serta Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD. Ketidak tercapaian target tersebut dikarena ada sub kegiatan-sub kegiatan yang masuk pada kegiatan dalam pelaksanaannya belum maksimal sehingga target yang diharapkan tidak tercapai.

Tabel 2.3
Sub Kegiatan Yang Belum Mencapai Target

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	Target	realisasi	Capaian Target
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD					
	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Terlaksananya pembahasan dan pembentukan raperda			
	Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Tersedianya raperda	16 Perda	8 Perda	50,00
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Tersedianya naskah akademik dan draf raperda	8 dokumen	4 dok	50,00
	Sub Kegiatan Penyusunan Tata Tertib DPRD	Tersedianya peraturan tata tertib	1 dokumen	0 dokumen	0
	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Terlaksananya penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat			
	Sub Kegiatan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah laporan kunjungan kerja dalam daerah	50 laporan	0 laporan	0
	Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	Jumlah dokumen pokok-pokok pikiran	3 kali	0 kali	0



	Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	Terlaksananya fasilitasi tugas DPRD			
	Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah dokumen laporan kinerja DPRD	1 dokumen	0	0

Pada sub kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah pada Tahun 2022 ditarget 16 raperda yaitu 10 raperda eksekutif dan 8 raperda inisiatif, dari 16 raperda yang ditarget hanya 8 raperda telah dilaksanakan pembahasannya sehingga pencapaian targetnya 50%. Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik dari target 8 penyusunan yang direncanakan pencapaian targetnya 4 penyusunan naskah akademik atau 50%. Sub kegiatan Penyusunan Tata Tertib DPRD di Tahun 2022 tidak dilakukan pembahasan.

Pada sub kegiatan Kunjungan Kerja Dalam Daerah yang dialokasikan untuk 50 anggota dewan realisasi target tidak ada karena dalam pelaksanaannya ada kegiatan dalam daerah hamper semua anggota melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Banten sedangkan sub kegiatan Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD tidak dilaksanakan sehingga target yang telah direncana 3 kali belum terealisasi. Pada sub kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD yang direncanakan 1 kali pelaksanaan tidak dilaksanakan sehingga untuk Tahun 2022 laporan kinerja DPRD tidak ada dokumen/buku laporan kinerja.

Capaian kinerja indikator Nilai Evaluasi AKIP berdasarkan hasil reuiu Inspektorat terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022 memperoleh skor angka 72,45 dari target yang ditentukan dalam Renstra yaitu 72,10 atau 100,48% atau masuk dalam kategori nilai **BB** termasuk dalam predikat Sangat Baik. Akuntabilitas kinerja sangat baik dimaknai dengan diawali terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki system manajemen kinerja yang cukup baik serta berbasis penggunaan teknologi informasi yang memadai, pengukuran kinerja yang telah dilakukan sudah pada level/tingkatan eselon 3 atau koordinator.

Namun demikian masih terdapat unsur-unsur manajemen kinerja yang belum dilaksanakan yang harus menjadi perhatian dan tindaklanjut perbaikan dalam penyusunan LAKIP tahun berikutnya, diantaranya belum disusunnya pedoman teknis perencanaan kinerja, belum terpublikasinya dokumen renstra dalam website Kabupaten Tangerang, rencana aksi yang disajikan dalam laporan evaluasi kinerja belum secara jelas menggambarkan aktivitas secara rinci sehingga dalam pelaksanaan program dan kegiatan rencana aksi belum mampu menjadi pedoman OPD dalam menjalankan aktivitasnya. Laporan monev setiap triwulan belum memuat informasi realisasi kinerja yang tidak mencapai target, tidak ada informasi faktor pendorong, faktor penghambat dan solusi



maupun rekomendasi serta rencana perbaikan yang diperlukan untuk capaian kinerja yang belum mencapai target pada setiap triwulan. Rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum seluruhnya ditindaklanjuti.

Mengacu pada rencana strategis Tahun 2019-2023 serta rencana kerja tahunan, Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang Tahun 2022 berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah melaksanakan 2 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota meliputi 9 kegiatan dengan 24 sub kegiatan dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD meliputi 8 kegiatan dengan 27 sub kegiatan yang dilaksanakan oleh empat bagian lingkup Sekretariat DPRD. Evaluasi pelaksanaan rencana kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang dapat dilihat seperti dibawah.



Tabel 2.4
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan
Pencapaian Renstra s/d Tahun 2022
Kabupaten Tangerang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun (2022)	Realisasi Renja SKPD Tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.02.001	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase pemenuhan administrasi kepegawaian dan umum								
		Prosentase pemenuhan administrasi dan program								
4.02.001.201	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan								
4.02.001.201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		7 dok	7 dok	7 dok	100	3 dok	7+7+2 = 16	
	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		-	-	-	-	1	-	
	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		-	-	-	-	1	1	



Sekretariat DPRD

	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		-	-	-	-	1	-	
	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		-	-	-	-	1	-	
4.02.001.201.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok	1+1+1=3	
4.02.001.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen laporan keuangan								
4.02.001.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		1 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok	1+1+1=3	
4.02.001.202.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD		1 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok	1+1=2	
4.02.001.205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang di fasilitasi								
4.02.001.205.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		350 stel	300 stel	300 stel	100	300 stel	350+300=650	
4.02.001.205.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		50 orang	52 orang	52 orang	100	50 orang	50+52+10=112	
4.02.001.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Kegiatan administrasi umum perangkat daerah								



Sekretariat DPRD

4.02.001.206.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		5 jenis	1 jenis	1 jenis	100	1 jenis	5+1+1=7	
4.02.001.206.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		6 jenis	7 jenis	7 jenis	100	7 jenis	6+7+1=14	
4.02.001.206.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		16 jenis	7 jenis	7 jenis	100	7 jenis	16+7+1=24	
4.02.001.206.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		4 jenis	3 jenis	3 jenis	100	3 jenis	4+3+1=8	
4.02.001.206.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		4 jenis	4 jenis	4 jenis	100	4 jenis	4+4+1=9	
4.02.001.206.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1948 dus	5000 dus	3550 dus	71	5000 dus	1948+3550+500=5998	
4.02.001.206.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		223 kali	85 kali	85 kali	100	85 kali	223+85+23=639	
4.02.001.207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang milik daerah yang diadakan								
4.02.001.207.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		2 jenis	3 item	3 item	100	3 item	2+3+5=10	
4.02.001.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang urusan Pemerintah daerah								
4.02.001.208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		9 unit	10 unit	10 unit	100	10 unit	9+10+6=25	
4.02.001.208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		16 orang	16 orang	16 orang	100	16 orang	16+16+16=48	
4.02.001.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah								



Sekretariat DPRD

		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
4.02.001.209.01	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		4 item	4 item	4 item	100	4 item	4+4=8	
4.02.001.209.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		5 jenis	3 item	3 item	100	3 item	5+3=8	
4.02.001.209.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		7 jenis	15 item	15 item	100	15 item	7+15=22	
4.02.001.209.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		1 unit	1 unit	1 unit	100	1 unit	1+1=2	
4.02.001.209.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 unit	1 unit	1 unit	100	1 unit	1+1=2	
4.02.001.215	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD								
4.02.001.215.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD		50 orang	50 orang	50 orang	100	50 orang	-	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan		50 orang	50 orang	50 orang	100	50 orang	50+50=100	
4.02.001.215.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Terlaksananya medical check up		38 orang	50 orang	16 orang	32,00	50 orang	38+16=54	
4.02.001.216	Layanan Administrasi DPRD	Persentase pemenuhan rapat-rapat DPRD								
4.02.001.216.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Terlaksananya fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD		41 kali	95 kali	85 kali	89,47	95 kali	41+85+20=146	
4.02.002	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase pemenuhan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD								
4.02.002.201	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Terlaksananya Pembentukan								



Sekretariat DPRD

		Peraturan daerah dan Peraturan DPRD Prosentase Pemenuhan Pembentukan Peraturan daerah dan Peraturan DPRD								
4.02.002.201.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		2 keg	2 keg	2 keg	100	4 keg	2+2=4	
4.02.002.201.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		14 perda	16 perda	8 perda	50,00	16 perda	14+8=22	
4.02.002.201.04	Fasilitasi Penyusunan Pejelasan/ Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/ atau Naskah Akademik yang Difasilitasi		-	8 dok	4 dok	50,00	8 dok	4	
4.02.002.201.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun		1 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok	1+1=2	
4.02.002.202	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Prosentase Pemenuhan pembahasan Kebijakan Anggaran Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran								
4.02.002.202.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS		1 kali	1 kali	1 kali	100	1 kali	1+1=2	
4.02.002.202.02	Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		1 kali	1 kali	1 kali	100	1 kali	1+1=2	
4.02.002.202.03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD		1 kali	1 kali	1 kali	100	1 kali	1+1=2	
4.02.002.202.04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan		1 kali	1 kali	1 kali	100	1 kali	1+1=2	
4.02.002.202.05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester		1 kali	1 kali	1 kali	100	1 kali	1+1=2	



Sekretariat DPRD

4.02.002.202.06	Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggung jawaban APBD		1 kali	1 kali	1 kali	100	1 kali		
4.02.002.203.01	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Prosentase Pemenuhan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Terselenggaranya Pengawasan Kinerja Pemerintahan								
4.02.002.203.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum		4 kali	4 kali	4 kali	100	4 kali	4+4+1=9	
4.02.002.203.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		4 kali	4 kali	4 kali	100	4 kali	4+4+1=9	
4.02.002.203.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		4 kali	4 kali	4 kali	100	4 kali	4+4+1=9	
4.02.002.203.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		4 kali	4 kali	4 kali	100	4 kali	4+4+1=9	
4.02.002.203.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan		-	2 kali	2 kali	100	2 kali	2	
4.02.002.204	Peningkatan Kapasitas DPRD	Prosentase Pemenuhan Peningkatan kapasitas DPRD Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD								
4.02.002.204.02	Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD		6 kali	6 kali	6 kali	100	6 kali	6+6+2=14	
4.02.002.204.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD		114 kali	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12+12+2=26	
4.02.002.204.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi		12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12+12+6=30	



Sekretariat DPRD

4.02.002.204.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		90 kali	600 kali	495 kali	83	600 kali	90+495+100=685	
4.02.002.204.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD		1 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok	1+1=2	
4.02.002.205	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Prosentase Pelaksanaan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat								
4.02.002.205.01	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD		-	3 kali	-	-	3 kali	-	
4.02.002.205.02	Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD yang Disusun		-	3 kali	-	-	100 dok	-	
4.02.002.205.03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses		2 kali	3 kali	3 kali	100	3 kali	2+3+1=6	
4.02.002.206	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase pemenuhan dokumen kode etik								
4.02.002.206.01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Dokumen Kode Etik DPRD yang Disusun		1 dok	1	-	-	1 dok	1	
4.02.002.207	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Prosentase Pemenuhan Komunikasi dan Publikasi Terlaksananya Komunikasi dan Publikasi								
4.02.002.207.02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun		51 kali	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12+12+2=26	
4.02.002.208	Fasilitasi Tugas DPRD	Prosentase Pemenuhan Fasilitasi Tugas DPRD Terlaksananya Fasilitasi Tugas DPRD								
4.02.002.208.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		85 kali	90 kali	90 kali	100	95 kali	85+90+20=195	



Sekretariat DPRD

4.02.002.208.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun		1 dok	1 dok	-	-	1 dok	-	
-----------------	---------------------------------	---	--	-------	-------	---	---	-------	---	--



Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Pada Tahun Anggaran 2024 Sekretariat DPRD melaksanakan 2 progam yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas 9 kegiatan dengan 33 sub kegiatan dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD terdiri atas 8 kegiatan dengan 32 sub kegiatan. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja yang dituangkan dalam program dan kegiatan seperti tabel diatas seluruhnya telah dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yaitu memfasilitasi tugas, fungsi dan wewenang DPRD dalam melaksanakan berbagai aktivitasnya.

Dari 2 program, 17 kegiatan dan 51 sub kegiatan 2022 yang telah dilaksanakan apabila melihat persentase capaian kinerja telah mencapai rata-rata 80 sampai 100 persen, namun terdapat beberapa kegiatan yang capaian kinerjanya masih belum memenuhi target. perbandingan Capaian realisasi program/kegiatan yang telah dilaksanakan Tahun 2021 dan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Perbandingan Realisasi Program/Kegiatan
Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja/Keluaran Tahun 2021 – 2022

Kode	Urusan/Bidang Pemerintah Daerah Program/Kegiatan	Urusan Daerah dan	Tahun 2021			Tahun 2022		
			Target	Target	Target	Target	Realisasi	Persentase
4.02.001	Program Penunjang Pemerintahan Kabupaten/ Kota	Urusan Daerah						
4.02.001.206 .03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		7 jenis	7 jenis	7 jenis	-	-	-
4.02.001.206 .08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		-	-	-	5000 dus	3550	71,00
4.02.001.2.1 5	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD							
4.02.001.2.1 5.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	16 orang	32,00
4.02.002	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD							
4.02.002.201	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD							
4.02.002.201 .02	Pembahasan rancangan peraturan daerah		16 perda	8 perda	50,00	16 perda	8 perda	50,00
4.02.002.201 .03	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan /Keterangan dan/atau Naskah Akademik		-	-	-	8 dok	4 dok	50,00



4.02.01.2.15	Layanan Keuangan Dan Kesejahteraan DPRD						
4.02.01.2.15.01	Pelaksanaan Medical Check Up DPRA	50 orang	38 orang	76,00	50 orang	16 orang	37,00

Tabel 2.2. merupakan target capaian kinerja berdasarkan capaian per program, per kegiatan dan sub kegiatan yang targetnya dibawah 80 persen, apabila dilihat secara keseluruhan dari 2 program, 18 kegiatan dan 51 sub kegiatan terdapat program yang capaiannya rata-rata 80 – 100 persen. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2021 dan 2022 yang menghasilkan Realisasi seperti tabel 2.3. tersebut ada beberapa permasalahan dan kendala yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target realisasi antara lain:

- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas realisasi sesuai dengan pengajuan service pemeliharaan dan menyesuaikan dengan fluktuasi harga BBM yang berlaku.
- Pembahasan 14 Raperda yang semula direncanakan, terealisasi 8 Raperda.
- Peningkatan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD dialokasikan untuk 50 orang anggota, realisasi hanya 16 orang yang menjalankan general check up.
- Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah tidak ada penyerapan sehingga realisasinya belum memenuhi target.
- Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar daerah realisasi sesuai biaya tiketing dan penginapan.
- Penyusunan Tata Tertib dan Kode Etik Tidak dilaksanakan karena belum adanya penyesuaian aturan yang terbaru.
- Pengembangan fasilitasi komunikasi dan informasi realisasi sesuai release kegiatan DPRD.
- Pemeliharaan jasa perijinan dan operasional kendaraan dinas/jabatan sesuai dengan pengajuan dan perpanjangan STNK.

Sedangkan realisasi 2 program, 17 kegiatan dan 51 sub kegiatan yang telah mencapai atau memenuhi target dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.6.
Program dan Kegiatan Yang Telah Mencapai Target

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2023)
			Target Renja SKPD Tahun (2022)	Realisasi Renja SKPD Tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	5	6	7	8=(7/6)	9
4.02.001	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					



4.02.001.201	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
4.02.001.201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dok	7 dok	7 dok	100	7 dok
4.02.001.201.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok
4.02.001.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
4.02.001.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok
4.02.001.202.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Triwulan/Semesteran SKPD	1 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok
4.02.001.205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
4.02.001.205.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	350 stel	300 stel	300 stel	100	300 stel
4.02.001.205.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50 orang	50 orang	50 orang	100	50 orang
4.02.001.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
4.02.001.206.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 jenis	1 jenis	1 jenis	100	1 jenis
4.02.001.206.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 jenis	7 jenis	7 jenis	100	7 jenis
4.02.001.206.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		7 jenis	7 jenis	100	7 jenis
4.02.001.206.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan	4 jenis	3 jenis	3 jenis	100	3 jenis
4.02.001.206.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4 jenis	4 jenis	4 jenis	100	4 jenis
4.02.001.206.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	223 kali	85 kali	85 kali	100	85 kali
4.02.001.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
4.02.001.208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9 unit	10 unit	10 unit	100	10 unit
4.02.001.208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	16 orang	16 orang	16 orang	100	16 orang
4.02.001.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
4.02.001.209.01	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4 item	4 item	4 item	100	4 item
4.02.001.209.05	Pemeliharaan Mebel	5 jenis	3 item	3 item	100	3 item
4.02.001.209.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7 Jenis	15 item	15 item	100	15 item
4.02.001.209.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit	1 unit	100	1 unit
4.02.001.209.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit	1 unit	100	1 unit



Sekretariat DPRD

4.02.001.215	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD					
4.02.001.215.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	50 orang	50 orang	50 orang	100	50 orang
4.02.001.216	Layanan Administrasi DPRD					
4.02.001.216.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	41 kali	95 kali	85 kali	89,47	95 kali
4.02.002	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD					
4.02.002.201	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD					
4.02.002.201.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	4 keg	2 keg	2 keg	100	4 keg
4.02.002.201.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	1 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok
4.02.002.202	Pembahasan Kebijakan Anggaran					
4.02.002.202.01	Pembahasan KUA dan PPAS	1 kali	1 kali	1 kali	100	1 kali
4.02.002.202.02	Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	1 kali	1 kali	1 kali	100	1 kali
4.02.002.202.03	Pembahasan APBD	1 kali	1 kali	1 kali	100	1 kali
4.02.002.202.04	Pembahasan APBD Perubahan	1 kali	1 kali	1 kali	100	1 kali
4.02.002.202.06	Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD	1 kali	1 kali	1 kali	100	1 kali
4.02.002.203.01	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan					
4.02.002.203.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	4 kali	4 kali	4 kali	100	4 kali
4.02.002.203.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	4 kali	4 kali	4 kali	100	4 kali
4.02.002.203.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	4 kali	4 kali	4 kali	100	4 kali
4.02.002.203.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	4 kali	4 kali	4 kali	100	4 kali
4.02.002.203.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	-	2 kali	2 kali	100	4 kali
4.02.002.204	Peningkatan Kapasitas DPRD					
4.02.002.204.02	Bimbingan Teknis DPRD	6 kali	6 kali	6 kali	100	6 kali
4.02.002.204.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	114 kali	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan
4.02.002.204.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan
4.02.002.204.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	90 kali	600 kali	495 kali	83	100 kali
4.02.002.204.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	1 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok
4.02.002.205	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat					
4.02.002.205.03	Pelaksanaan Reses	2 kali	3 kali	3 kali	100	3 kali
4.02.002.206	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD					
4.02.002.206.01	Penyusunan Kode Etik DPRD	1 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok



4.02.002.208	Fasilitas Tugas DPRD					
4.02.002.208.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	77 kali	90 kali	90 kali	100	95 kali

Dalam pelaksanaan seluruh program dan kegiatan dengan realisasi seperti pada tabel 2.6. tentunya banyak penyebab, kendala, hambatan ketidak berhasilan tercapainya program dan kegiatan maupun pendukung, pendorong dan penunjang tercapainya pelaksanaan program dan kegiatan.

Tabel 2.7.
Faktor-faktor Tidak Tercapainya/Terpenuhinya atau Melebihi Target Kinerja

No.	Faktor-faktor Penyebab	Tidak Tercapai Target	Terpenuhi Target	Melebihi Target
1.	Perencanaan dan anggaran	Belum Optimal	Optimal	Optimal
2.	SOP kegiatan dan sub kegiatan	Belum seluruhnya ada SOP	Adanya SOP kegiatan dan sub kegiatan	Berjalannya SOP dengan baik
3.	Koordinasi antar bagian dan sub bagian	Belum Maksimal	Peningkatan koordinasi antar bagian sub bagian	Optimalisasi koordinasi antar bagian sub bagian
4.	Pendidikan dan Pelatihan	Kurangnya Bintek	Peningkatan Bintek	Peningkatan Bintek
5.	Pendidikan Formal (Bidang Hukum, Komputer, Akuntansi)	Kurang/Tidak Sesuai Bidang	Sesuai Bidang	Peningkatan Aparatur Sesuai Bidang
6.	Pelaksanaan Program dan Kegiatan	Belum Sesuai Jadwal	Sesuai Jadwal	Sesuai Jadwal
7.	Monitoring dan Evaluasi	Kurangnya Monitoring dan Evaluasi	Berjalannya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	Peningkatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Dari tabel 2.7 diatas terutama faktor-faktor penyebab tidak tercapainya realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tentunya akan menimbulkan implikasi terhadap pencapaian program renstra antara lain :

1. Faktor perencanaan dan anggaran berimplikasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang tidak tepat waktu dan tidak terserapnya sebagian atau seluruh anggaran yang direncanakan.
2. Faktor sumberdaya aparatur berimplikasi pada kurang optimalnya pelaksanaan program dan kegiatan disebabkan minimnya kualitas aparatur terhadap pemahaman pelaksanaan program dan kegiatan, kurangnya disiplin mengakibatkan minimnya rasa tanggung jawab terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.
3. Faktor sarana dan prasarana berimplikasi pada kurang optimalnya dalam peningkatan kinerja aparatur baik dalam pelaksanaan program dan kegiatan maupun pada pelaksanaan kinerja sesuai tupoksinya.



4. Faktor pendidikan dan pelatihan formal berimplikasi pada kurang pemahaman dan profesionalisme aparaturnya terhadap pelaksanaan kinerja baik program dan kegiatan serta kurangnya bintek menyebabkan ketrampilan dan kemampuan tidak ada peningkatan.
5. Faktor pendidikan formal berimplikasi pada kurang profesionalisme dibidangnya, kurangnya pemahaman diakibatkan tidak sesuainya kinerja aparaturnya dengan latar belakang pendidikan.
6. Faktor pelaksanaan program dan kegiatan berimplikasi pada belum sesuainya jadwal berakibat target pelaksanaan program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana, kemungkinan terjadi pengurangan anggaran ataupun tidak terserapnya anggaran.

Mencermati hal itu serta untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut agar tidak menjadi kendala dan permasalahan serta meminimalisir faktor penyebab, Sekretariat DPRD berusaha melakukan kebijakan perencanaan dan penganggaran sebagai berikut :

1. Peningkatan perencanaan program dan kegiatan secara menyeluruh pada setiap bagian lingkup Sekretariat DPRD.
2. Mencermati pengelolaan anggaran secara tepat guna dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan.
3. Peningkatan program dan kegiatan melalui pelaksanaan kegiatan yang tepat waktu sesuai rencana yang ditetapkan.
4. Peningkatan koordinasi dan komunikasi antar bagian lingkup Sekretariat DPRD maupun dengan instansi/badan/lembaga terkait lainnya.
5. Peningkatan profesionalisme sumberdaya aparaturnya melalui pendidikan dan pelatihan maupun sesuai dengan latar belakang pendidikan (Hukum, Akuntansi, Komputer dan lainnya).
6. Peningkatan penatausahaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
7. Peningkatan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Mengacu pada realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan, pencapaian kinerja Sekretariat DPRD berdasarkan indikator kinerja yang seluruh program dan kegiatan baik program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota maupun program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang memang langsung memfasilitasi fungsi, tugas dan wewenang DPRD telah dilaksanakan dengan indikator sebagai berikut :

2.2.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Indikator : Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.



Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Indikator : Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah

Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD.

Indikator : Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator : Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan.

Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator : Tersedianya gaji dan tunjangan ASN

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.

Indikator : Tersusunnya keuangan akhir tahun dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun PD.

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator : Jumlah Pegawai Yang difasilitasi.

Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.

Indikator : Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

Indikator : Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator : Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator : Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor .

Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Indikator : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor.

Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.

Indikator : Tersedianya peralatan rumah tangga

Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.



Indikator : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan.

Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Indikator : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.

Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu.

Indikator : Tersedianya fasilitas kunjungan tamu.

Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD.

Indikator : Terselenggaranya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi PD

e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Umum.

Indikator : Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah.

Sub kegiatan Pengadaan Mebel.

Indikator : Tersedianya mebel

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator : Tersedianya Jasa Penunjang

Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik.

Indikator : Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik.

Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator : Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor.

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Indikator : Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan.

Indikator : Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya.

Sub kegiatan Pemeliharaan Mebel

Indikator : Terlaksananya pemeliharaan mebel.

Sub kegiatan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator : Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.

Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya



Indikator : Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya

Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Indikator : Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya.

h. Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

Indikator : Terlaksananya Layanan Gaji dan Tunjangan DPRD.

Sub kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD.

Indikator : Tersedianya hak keuangan DPRD.

Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD.

Indikator : Terlaksananya medical check up DPRD

i. Kegiatan Layanan Administrasi DPRD.

Indikator : Tersedianya Rapat dan Konsultasi DPRD.

Sub kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD.

Indikator : Terlaksananya fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD.

2.2.2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

a. Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

Indikator : Terlaksananya Pembahasan dan Pembentukan Raperda.

Sub kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah.

Indikator : Terlaksananya penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah.

Sub kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Indikator : Terlaksananya pembahasan rancangan peraturan daerah.

Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik.

Indikator : Terlaksananya fasilitasi penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.

Sub kegiatan Penyusunan Tata Tertib

Indikator : Tersusunnya tata tertib DPRD.



- b. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran.
 - Indikator : Terlaksananya Pembahasan dan Penetapan Rencana Anggaran
 - Sub kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS.
 - Indikator : Terlaksananya pembahasan KUA dan PPAS
 - Sub kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS.
 - Indikator : Terlaksananya pembahasan perubahan KUA dan PPAS
 - Sub kegiatan Pembahasan APBD.
 - Indikator : Terlaksananya pembahasan APBD
 - Sub kegiatan Pembahasan APBD Perubahan.
 - Indikator : Terlaksananya pembahasan APBD perubahan
 - Sub kegiatan Pembahasan Laporan Semesteran
 - Indikator : Terlaksananya hasil pembahasan realisasi peralaksana APBD per semester.
 - Sub kegiatan Pembahasan Pertanggung jawaban APBD.
 - Indikator : Terlaksananya pembahasana pertanggung jawaban APBD
- c. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
 - Indikator : Terselenggaranya Pengawasan Kinerja Pemerintahan.
 - Sub kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dna Hukum.
 - Indikator : Terlaksananya pengawasan urusan bidang pemerintahan dan hukum
 - Sub kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
 - Indikator : Terlaksananya pengawasan urusan bidang infrastruktur.
 - Sub kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat.
 - Indikator : Terlaksananya pengawasan urusan bidang kesejahteraan rakyat.
 - Sub kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
 - Indikator : Terlaksananya pengawasan urusan bidang perekonomian.
 - Sub kegiatan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
 - Indikator : Terlaksananya pengawasan tindak lanjut pemeriksaan keuangan oleh BPK.
- d. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD
 - Indikator : Terlaksananya Pemenuhan Fasilitas Kapasitas DPRD.
 - Sub kegiatan Pendalaman Tugas DPRD
 - Indikator : Terlaksananya pendalaman tugas DPRD.
 - Sub kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan
 - Indikator : Terlaksananya penyebarluasan produk hukum daerah, publikasi dokumentasi dewan.
 - Sub kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli.
 - Indikator : Tersedianya kelompok pakar dan tim ahli.
 - Sub kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi



- Indikator : Tersedianya tenaga ahli fraksi.
Sub kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat.
Indikator : Terselenggaranya hubungan masyarakat
Sub kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD
Indikator : Tersusunnya rencana kerja DPRD.
- e. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
Indikator : Jumlah Laporan Hasil Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat.
Sub kegiatan Kunjungan Kerja Dalam Daerah
Indikator : Jumlah laporan hasil kunjungan kerja DPRD
Sub kegiatan Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD
Indikator : Tersusunnya pokok-pokok pikiran DPRD
Sub kegiatan Pelaksanaan Reses.
Indikator : Terlaksananya reses.
- f. Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik.
Indikator : Terlaksananya Pelaksanaan Kode Etik DPRD
Sub kegiatan Penyusunan Kode Etik DPRD.
Indikator : Tersusunnya kode etik dan tata beracara DPRD.
- g. Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah.
Indikator : Terlaksananya Komunikasi dan Publikasi.
Sub kegiatan Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi.
Indikator : Tersusunnya bahan komunikasi dan publikasi.
- h. Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD
Indikator : Terlaksananya Fasilitasi Tugas DPRD
Sub kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
Indikator : Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
Sub kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
Indikator : Tersusunnya laporan fraksi, alat kelengkapan dan kinerja DPRD.

Indikator tersebut diatas adalah indikator Renstra Tahun 2019-2023 yang mengacu RJPMD Perubahan Pemerintah Daerah Tahun 2019-2023. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD merupakan program dan kegiatan yang didalam terdapat program prioritas yaitu Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD salah satu kegiatannya adalah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, seluruh pencapaian indikator kegiatan dan sub kegiatan seperti tabel berikut :



Tabel 2.7.--
Pencapaian Kinerja Program Pelayanan Sekretariat DPRD
Kabupaten Tangerang

No.	Indikator	Indikator Kinerja, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian					Proyeksi 2024	Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan													
1.	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	-	
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dok	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dok	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dok	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dok	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dok	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Keuangan													
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dok	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dok	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	



Sekretariat DPRD

3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang di fasilitasi													
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Stel	350	350	300	300	300	350	350	300	300	-		
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	50	32	50	50	50	50	32	50	50	10		
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Kegiatan administrasi umum perangkat daerah													
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jenis	5	5	1	1	1	5	5	1	1	1		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Item	6	7	7	7	7	6	7	5	7	1		
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jenis	16	16	7	7	7	16	16	5	7	1		
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jenis	4	4	3	3	3	4	4	3	3	1		
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jenis	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1		
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dus	1969	12100	5000	5000	5000	1948	8695	4061	3550	500		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dok	100	140	85	85	90	100	123	85	85	23		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang milik daerah yang diadakan													
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Item	2	1	3	3	5	2	1	1	3	5		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang urusan Pemerintah daerah													
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	bulan	9	9	10	10	12	9	9	10	10	6		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Orang	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau	item	57	58	4	4	3	57	58	4	4	-		



Sekretariat DPRD

	Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya													
	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jenis	5	5	3	3	3	5	5	3	3	-		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Item	7	17	15	15	15	7	17	10	15	-		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	-	-	1	1	1	-	-	1	1	-		
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD												
	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang atau bulan	50	50	50	12	12	50	50	50	12			
	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Orang	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang	50	50	50	50	50	38	2	16	16	-		
	Layanan Administrasi DPRD	Tersedianya Fasilitas Rapat-rapat dan Koordinasi DPRD												
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kali	41	41	95	95	95	41	41	85	85	20		
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase pemenuhan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD												
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Terlaksananya Pembentukan Peraturan daerah dan Peraturan DPRD Prosentase Pemenuhan Pembentukan Peraturan daerah dan Peraturan DPRD												
	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Keg	-	-	5	2	2	-	-	4	2	-		
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Perda	10	11	12	13	14	14	8	8	9	-		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Dok	-	-	8	8	4	-	-	7	4	-		



Sekretariat DPRD

		Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Dok	1	1	1	1	1	1	-	-	1	-		
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Prosentase Pemenuhan pembahasan Kebijakan Anggaran Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran													
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Kali	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-		
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kali	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-		
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Kali	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-		
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Kali	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-		
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Kali	1	1	1	2	1	1	1	1	1	-		
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kali	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-		
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Prosentase Pemenuhan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Terselenggaranya Pengawasan Kinerja Pemerintahan													
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Kali	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	1	
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Kali	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	1	
		Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kali	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	1	
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Kali	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	1	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Kali	-	-	4	4	4	-	-	3	2	-		
	Peningkatan Kapasitas DPRD	Prosentase Pemenuhan Peningkatan kapasitas DPRD Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD													
		Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Kali	6	6	6	6	6	6	6	6	5	6	2	



Sekretariat DPRD

		Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Kali dan Bulan	110	110	12	12	12	102	104	106	12	2		
		Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6		
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Kali	10	100	100	600	600	90	100	91	495	100		
		Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dok	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-		
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Prosentase Pelaksanaan Penyerapan dan penghimpunan Aspirasi Masyarakat Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat													
		Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Lap atau kali	21	50	3	3	3	-	50	-	-	-		
		Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dok atau kali	-	-	3	3	3	-	-	-	-	-		
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Kali	3	3	3	3	3	2	2	3	3	1		
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Prosentase Penyusunan Kode Etik													
		Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Dok	1	1	1	1	1	1	-	-	1	-		
	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Prosentase Pemenuhan Komunikasi dan Publikasi Terlaksananya Komunikasi dan Publikasi													
		Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	Kali atau Bulan	72	60	12	12	12	51	34	12	12	2		
	Fasilitasi Tugas DPRD	Prosentase Pemenuhan Fasilitasi Tugas DPRD Terlaksananya Fasilitasi Tugas DPRD													
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kali	85	85	85	90	90	77	85	85	90	20		
		Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Dok	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-		
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dok	-	-	-	-	26	-	-	-	-	-		
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Dok					2	-	-	-	-	-		



2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang serta Peraturan Bupati Tangerang Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang, secara organisatoris dan manajerial Sekretariat DPRD merupakan fasilitator yang menopang seluruh tugas, fungsi dan kewenangan DPRD dalam melaksanakan kegiatan yang dituangkan dalam rencana kerja tahunan DPRD baik bersifat rutinitas maupun terdapat dalam program dan kegiatan yang telah merencanakan.

Fasilitasi yang diberikan Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD dilakukan mengacu pada pelayanan prima yaitu pelayanan terbaik dengan memperhatikan kebutuhan yang mampu mendukung kegiatan DPRD sehingga capaian kinerja dengan hasil memuaskan.

Pelayanan prima merupakan pelayanan yang berdimensi pada ketepatan waktu, kelayakan pelayanan, keramahan dan kesopanan, pelayanan yang cepat, pelayanan terhadap informasi, profesionalisme SDM dan pelayanan terkait dengan kondisi dan lingkungan tempat aktivitas akan dilaksanakan.

Sekretariat DPRD sebagai fasilitator menyadari sepenuhnya akan hal tersebut, semua dimensi telah diupayakan dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran Sekretariat DPRD dengan segala kemampuan yang ada. Namun demikian dalam rentang pelaksanaan fasilitasi terhadap DPRD terdapat beberapa permasalahan dan hambatan yang mengganggu jalan fasilitasi walaupun secara keseluruhan tidak mengganggu pelaksanaan kinerja DPRD.

Beberapa isu-isu penting atau permasalahan dan hambatan yang terjadi dalam melakukan fasilitasi terhadap DPRD antara lain :

1. Belum optimalnya perencanaan dan penganggaran disetiap bagian.
2. Belum optimalnya koordinasi baik dengan DPRD, antar bagian maupun dengan instansi/dinas/lembaga lainnya.
3. Kurangnya komunikasi yang berkelanjutan antara DPRD, antar bagian maupun dengan instansi/dinas/lembaga terkait dengan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
4. Perlu adanya perbaikan dan peningkatan profesionalisme aparatur baik dari segi kualitas maupun kuantitas.



5. Minimnya SDM yang sesuai dengan bidang pendidikan (Hukum, Akuntansi, Komputer, Kearsipan dan lain-lain).
6. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan terhadap semua aspek yang menunjang kinerja DPRD.
7. Sebagai organisasi yang memfasilitasi kegiatan DPRD, Sekretariat DPRD menyadari bahwa tanggungjawab keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD merupakan implementasi dari harapan dan keinginan masyarakat luas serta bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian untuk dapat melakukan fasilitasi terhadap DPRD tersebut agar berjalan sesuai dengan harapan terdapat tantangan yang dihadapi oleh seluruh jajaran Sekretariat DPRD antara lain :
 1. Pada aspek perencanaan dan anggaran, perlu adanya kematangan dalam rencana anggaran maupun rencana pelaksanaan kegiatan.
 2. Pada aspek koordinasi, perlu adanya kesinambungan dan kemampuan aparatur dalam melakukan koordinasi.
 3. Pada aspek komunikasi, diperlukan peningkatan kemampuan komunikasi aparatur pada semua bidang.
 4. Pada aspek SDM, diperlukan peningkatan profesionalisme dari segi kualitas maupun kuantitas.
 5. Pada aspek profesionalisme, adanya penempatan pegawai sesuai dengan bidang pendidikan yang dimiliki.
 6. Pada aspek monitoring dan evaluasi, optimalisasi monitoring dan evaluasi terhadap check and recheck serta laporan pelaksanaan program dan kegiatan.

Dengan memperhatikan hal-hal antara lain sebagaimana diatas, Sekretariat DPRD berupaya membuat suatu rekomendasi dan catatan untuk ditindaklanjuti oleh seluruh jajaran Sekretariat DPRD yaitu fasilitasi program dan kegiatan terhadap DPRD sesuai tugas, fungsi dan kewenangan agar melalui perencanaan dan penganggaran yang akurat, tepat dan cepat, meningkatkan koordinasi dan komunikasi, peningkatan profesionalisme aparatur melalui pendidikan formal maupun non formal, peningkatan monitoring dan evaluasi sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan serta membuat laporan yang akuntabel dan transparan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan

Berdasarkan pagu indikatif dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang, Sekretariat DPRD untuk Tahun 2023 Perubahan alokasi anggaran pagu indikatif Perubahan sebesar Rp. 134.144.654.584,- yang dialokasikan untuk program Penunjang



Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota sebesar Rp. 77.409.270.259,-. Dan program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD sebesar sebesar Rp. 56.735.384.325,-

Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang diubah terakhir dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Tahun 2022 Sekretariat DPRD melaksanakan 2 program, 17 kegiatan dan 51 sub kegiatan sedangkan Tahun 2023 DPRD melaksanakan 2 program, 17 Kegiatan dan 60 sub kegiatan yaitu :

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Program ini meliputi 9 kegiatan dengan 29 sub kegiatan hasil koordinasi dan pemetaan bersama dengan Bappeda. Kegiatan dan sub kegiatan tersebut sudah mulai dilaksanakan pada Tahun 2021. Alokasi anggaran Tahun 2023 untuk 9 kegiatan dan 29 sub kegiatan sebesar Rp. 77.409.270.259,- namun demikian anggaran tersebut secara keseluruhan belum menunjang terhadap fasilitasi tugas dan fungsi DPRD, diperkirakan akan berubah pada saat perubahan anggaran.

2. Program Dan program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

Program ini meliputi 8 kegiatan dengan 31 sub kegiatan merupakan program program yang langsung memfasilitasi kegiatan DPRD. Alokasi anggaran Tahun 2023 untuk 8 kegiatan dan 31 sub kegiatan sebesar Rp. 51.662.652.000,- anggaran tersebut secara keseluruhan belum menopang terhadap fasilitasi tugas dan fungsi DPRD, diperkirakan akan berubah pada saat perubahan anggaran.

Mengacu pada hasil reviu Bappeda dan memperhatikan tugas dan fungsi serta aktivitas kegiatan dewan yang memerlukan alokasi anggaran yang berbeda dari OPD lain. maka Sekretariat DPRD mendapat alokasi anggaran yang sudah tercantum dalam SIPD sebesar Rp. 134.144.654.584,- merupakan indikatif program, kegiatan dan sub kegiatan untuk Tahun 2023 Perubahan. Review sebagaimana paparan diatas sudah merujuk pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang diubah terakhir dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan.

Terbitnya Permendagri 90 Tahun 2019 diubah terakhir dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang berlaku secara nasional menghendaki adanya perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang disesuaikan dengan permendagri tersebut dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pembangunan



Daerah atau SIPD yang dirancang oleh Kemendagri. Penerapan SIPD dimaksud harus sudah berjalan pada Tahun 2023 secara nasional dengan penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditentukan oleh Kemendagri untuk seluruh pemerintah daerah termasuk untuk PD yang ada di daerah.

Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang sebagai salah satu perangkat daerah pada Tahun 2023 telah berkoordinasi secara intensif dengan PD terkait dalam hal ini dengan Bappeda dan Organisasi untuk memetakan dan menetapkan kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 serta disesuaikan dengan kebutuhan fasilitasi tugas dan fungsi DPRD. Mengacu Permendagri serta memperhatikan hasil pemetaan kegiatan dan sub kegiatan, Sekretariat DPRD mengelola 2 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan 9 kegiatan dialokasikan pada 29 sub kegiatan dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan 8 kegiatan dialokasikan pada 31 sub kegiatan.

Agar semua program, kegiatan dan sub kegiatan diperlukan adanya anggaran guna menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang merupakan pagu Perubahan dari TAPD atau Bappeda untuk Tahun 2023 sebesar Rp. 134.144.654.584,- dialokasikan untuk program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 73.383.611.572,- dan program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD sebesar Rp. 51.662.652.000,-.

Estimasi rincian anggaran tersebut sesuai kebutuhan untuk 2 program, 17 kegiatan dan 60 sub kegiatan dapat dilihat seperti pada tabel :



Tabel 2.8.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Perubahan
Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Prosentase pemenuhan administrasi kepegawaian dan umum		77.409.270259	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Prosentase pemenuhan administrasi kepegawaian dan umum		77.409.270259	
			Prosentase pemenuhan administrasi dan program					Prosentase pemenuhan administrasi dan program			
	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan		135.844.410	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan		135.844.410	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	64.467.450	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	64.467.450	
	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	18.737.176	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	18.737.176	
	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	11.063.710	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD dan		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	11.063.710	



			dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			laporan hasil koordinasi penyusunan		dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			
	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	19.943.910	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	19.943.910	
	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	11.507.700	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	11.507.700	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	10.124.464	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	10.124.464	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Keuangan		10.482.242.473	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Keuangan		10.482.242.473	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 dokumen	10.473.582.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 dokumen	10.473.582.001	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	8.660.472	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	8.660.472	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Triwulan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1 dokumen	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Triwulan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1 dokumen	-	



	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah pegawai yang di fasilitasi		774.596.733	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah pegawai yang di fasilitasi		774.596.733
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	70 stel	170.017.436	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	70 stel	170.017.436
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	52 orang	604.579.297	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	52 orang	604.579.297
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Jenis Kegiatan administrasi umum perangkat daerah		13.677.561.311	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Jenis Kegiatan administrasi umum perangkat daerah		13.677.561.311
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 jenis	885.350.478	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 jenis	885.350.478
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 jenis	822.881.069	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 jenis	822.881.069
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 jenis	375.081.129	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 jenis	375.081.129
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 jenis	250.070.683	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 jenis	250.070.683
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 jenis	354.927.600	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 jenis	354.927.600
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5000 dus	681.400.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5000 dus	681.400.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	88 kali	10.634.850.352	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	88 kali	10.634.850.352



	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Barang milik daerah yang diadakan		1.791.542.324	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Barang milik daerah yang diadakan		1.791.542.324
	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 unit	1.791.542.324	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 unit	1.791.542.324
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang urusan Pemerintah daerah		549.256.500	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang urusan Pemerintah daerah		549.256.500
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	60.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	60.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan	489.2256.500	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan	489.2256.500
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.590.816.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.590.816.000
	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 item	660.642.000	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 item	660.642.000
	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 unit	56.000.000	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 unit	56.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 item	144.860.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 item	144.860.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	423.748.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	423.748.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	25 unit	305.566.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	25 unit	305.566.000



Sekretariat DPRD

	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi			Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		46.450.267.108	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		46.450.267.108
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50 orang	45.044.728.368	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50 orang	45.044.728.368
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	200 paket	1.227.033.700	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	200 paket	1.227.033.700
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	50 orang	178.505.040	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	50 orang	178.505.040
	Layanan Administrasi DPRD		Tersedianya Fasilitas Rapat-rapat dan Koordinasi DPRD		1.957.143.400	Layanan Administrasi DPRD		Tersedianya Fasilitas Rapat-rapat dan Koordinasi DPRD		1.957.143.400
	Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	95 kali	1.957.143.400	Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	95 kali	1.957.143.400
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		Persentase pemenuhan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD		56.735.384.325	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		Persentase pemenuhan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD		56.735.384.325
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Terlaksananya Pembentukan Peraturan daerah dan Peraturan DPRD Prosentase Pemenuhan Pembentukan Peraturan daerah dan Peraturan DPRD		3.717.448.858	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Terlaksananya Pembentukan Peraturan daerah dan Peraturan DPRD Prosentase Pemenuhan Pembentukan Peraturan daerah dan Peraturan DPRD		3.717.448.858
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	2 kegiatan	454.367.200	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	2 kegiatan	454.367.200
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil	16 perda	2.518.582.400	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil	16 perda	2.518.582.400



			Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah					Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah			
	Fasilitasi Penyusunan Pejelasan/ Keterangan dan/atau Naskah Akademik		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Pejelasan atau Keterangan dan/ atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	8 dokumen	710.645.985			Fasilitasi Penyusunan Pejelasan/ Keterangan dan/atau Naskah Akademik	8 dokumen	710.645.985	
	Penyusunan Tata Tertib DPRD		Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 dokumen	33.853.273			Penyusunan Tata Tertib DPRD	1 dokumen	33.853.273	
	Pembahasan Kebijakan Anggaran		Prosentase Pemenuhan pembahasan kebijakan Anggaran Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran		976.905.600			Pembahasan Kebijakan Anggaran		976.905.600	
	Pembahasan KUA dan PPAS		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 kali	156.700.150			Pembahasan KUA dan PPAS	1 kali	156.700.150	
	Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 kali	156.700.150			Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	1 kali	156.700.150	
	Pembahasan APBD		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 kali	156.700.150			Pembahasan APBD	1 kali	156.700.150	
	Pembahasan APBD Perubahan		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 kali	156.700.150			Pembahasan APBD Perubahan	1 kali	156.700.150	
	Pembahasan Laporan Semester		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	2 kali	73.790.800			Pembahasan Laporan Semester	2 kali	73.790.800	
	Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 kali	276.314.200			Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD	1 kali	276.314.200	
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		Prosentase Pemenuhan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Terselenggaranya Pengawasan Kinerja Pemerintahan		1.7712.138.450			Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		1.7712.138.450	



	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan dan Hukum	4 kali	332.540.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan dan Hukum		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan dan Hukum	4 kali	332.540.000	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	4 kali	322.964.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	4 kali	322.964.000	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	4 kali	322.964.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	4 kali	322.964.000	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	4 kali	332.540.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	4 kali	332.540.000	
	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	2 kali	123.527.000	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	2 kali	123.527.000	
	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah		Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah	1 kali	277.603.450	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah		Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah	1 kali	277.603.450	
	Peningkatan Kapasitas DPRD		Prosentase Pemenuhan Peningkatan kapasitas DPRD Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD		9.038.512.552	Peningkatan Kapasitas DPRD		Prosentase Pemenuhan Peningkatan kapasitas DPRD Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD		9.038.512.552	
	Pendalaman Tugas DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 kali	1.631.700.000	Bimbingan Teknis DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 kali	1.631.700.000	
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan		Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	12 bulan	2.124.920.720	Publikasi dan Dokumentasi Dewan		Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	12 bulan	2.124.920.720	
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli		Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	3 orang	312.648.750	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli		Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	3 orang	312.648.750	
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	12 bulan	791.930.400	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		Jumlah Dokumen Hasil	12 bulan	791.930.400	



								Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat			
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	100 kali	4.053.509.432	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	100 kali	4.053.509.432	
	Penyusunan Program Kerja DPRD		Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 dokumen	123.803.250	Penyusunan Program Kerja DPRD		Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	1 dokumen	123.803.250	
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Prosentase Pelaksanaan Penyerapan dan penghimpunan Aspirasi Masyarakat Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		8.660.229.200	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Prosentase Pelaksanaan Penyerapan dan penghimpunan Aspirasi Masyarakat Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		8.660.229.200	
	Kunjungan Kerja Dalam Daerah		Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	3 kali	631.545.250	Kunjungan Kerja Dalam Daerah		Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	3 kali	631.545.250	
	Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD		Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	3 kali	55.912.750	Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD		Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	3 kali	55.912.750	
	Pelaksanaan Reses		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 kali	7.972.771.200	Pelaksanaan Reses		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 kali	7.972.771.200	
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		Prosentase Penyusunan Kode Etik		28.743.965	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		Prosentase Penyusunan Kode Etik		28.743.965	
	Penyusunan Kode Etik DPRD		Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 dokumen	28.743.965	Penyusunan Kode Etik DPRD		Tersusunnya kode etik dan tata beracara	1 dokumen	28.743.965	
	Pembahasan Kerja Sama Daerah		Prosentase Pemenuhan Komunikasi dan Publikasi Terlaksananya Komunikasi dan Publikasi		199.980.000	Pembahasan Kerja Sama Daerah		Prosentase Pemenuhan Komunikasi dan Publikasi Terlaksananya Komunikasi dan Publikasi		199.980.000	
	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi		Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	12 bulan	199.980.000	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi		Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	12 bulan	199.980.000	
	Fasilitasi Tugas DPRD		Prosentase Pemenuhan Fasilitasi Tugas DPRD Terlaksananya		32.401.425.700	Fasilitasi Tugas DPRD		Prosentase Pemenuhan Fasilitasi Tugas DPRD Terlaksananya		32.401.425.700	



Sekretariat DPRD

			Fasilitasi Tugas DPRD				Fasilitasi Tugas DPRD			
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	95 kali	32.310.708.000	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	95 kali	32.310.708.000	
	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD		Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 dokumen	40454.200	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 dokumen	40454.200	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	48 kali/ dokumen	25.338.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	48 kali/ dokumen	25.338.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	2 kali/ dokumen	24.925.500	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	2 kali/ dokumen	24.925.500	



2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang sebagai fasilitator berbagai kegiatan DPRD dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya melalui Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang diubah dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 telah memetakan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2023 yang memfasilitasi aktivitas dewan baik yang berkaitan langsung dengan kepentingan dewan maupun kegiatan penunjang guna kelancaran dan keberhasilan tugas dan fungsi DPRD.

Pada Tahun 2023 Sekretariat DPRD direncanakan akan mengelola program dan kegiatan terdiri atas 2 program, 19 Kegiatan dan 60 sub kegiatan. Dengan demikian Tahun 2023 Sekretariat DPRD tidak menampung serta mengelola kegiatan yang berasal maupun atas usulan pemangku kepentingan, kelompok masyarakat terkait langsung pelayanan provinsi, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi atau dari stakeholder lainnya.



BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka meningkatkan peran dan tanggungjawab lembaga perwakilan rakyat daerah untuk mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya serta mengembangkan mekanisme check and balance antara DPRD dan Pemerintah Daerah serta meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja anggota DPRD demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat luas. Mekanisme check and balance dilandasi pada prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap tugas, fungsi dan wewenang DPRD sebagai cerminan representatif lembaga perwakilan rakyat.

DPRD dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara pemerintah daerah mempunyai kedudukan yang sama dengan pemerintah daerah dalam membangun dan mengusahakan dukungan dalam penetapan kebijakan pemerintah daerah yang menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat diterima dan dirasakan oleh masyarakat.

Atas dasar hal itu guna meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja DPRD dalam mewujudkan peran DPRD dalam menjalankan check and balance terhadap kebijakan pemerintah daerah, Sekretariat DPRD seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah merupakan fasilitator dalam upaya menunjang tugas, fungsi dan wewenang DPRD dalam menjalankan berbagai aktivitas dan kegiatan untuk mencapai kinerja yang maksimal sebagai pengemban amanah rakyat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja

Dalam rangka mewujudkan fasilitasi pelayanan yang optimal terhadap DPRD Kabupaten Tangerang serta mendukung pencapaian terwujudnya visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD Kabupaten Tangerang, Sekretariat DPRD pada Tahun 2019-2023 mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran Kabupaten Tangerang dalam rangka menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.

Visi Kabupaten Tangerang

Visi adalah cita-cita yang merupakan tujuan masa depan atau pandangan jauh kedepan yang hendak dicapai serta gambaran masa tentang dalam kurun 5 (lima) tahunan yang



hendak diwujudkan oleh seluruh jajaran perangkat daerah Kabupaten Tangerang. Adapun Visi Kabupaten Tangerang guna mencapai cita-cita pemerintah daerah adalah :

***“ Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tangerang Yang Religius,
Cerdas, Sehat dan Sejahtera ”***

Religius mengandung bahwa nilai-nilai agama mendasari sikap dan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan prinsip-prinsip keagamaan yang di anut.

Cerdas yang mengandung makna memiliki wawasan, kemampuan, dan keterampilan yang cukup terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pencapaian tingkat pendidikan formal sehingga mendukung kualitas sumber daya masyarakat sebagai subyek pembangunan.

Sehat yang mengandung makna memiliki keadaan sumber daya manusia yang sempurna baik fisik, mental dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Sejahtera mengandung makna memiliki tingkat kesejahteraan tertentu yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan papan secara merata serta memiliki daya beli yang memadai sehingga mampu mewujudkan kemandirian didukung kelestarian lingkungan hidup

Misi

Visi RPJMD Tahun 2019-2023 tersebut dijabarkan melalui enam misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Meningkatkan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religius.
2. Meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat.
3. Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif dan berbasis kerakyatan



4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel.
5. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Tata Ruang wilayah.
6. Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya.

Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD 2019-2023

Dalam RPJMD Tahun 2019-2023 telah ditentukan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan. Sekretariat DPRD sebagai perangkat daerah menyesuaikan Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan tersebut guna menunjang keberhasilan pembangunan daerah sebagaimana tabel dibawah :

Tabel 3.1
Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD 2019-2023
Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
4.	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Transparan dan Akuntabel	4.1. Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah	4.1.2. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	4.1.12. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Sekretariat DPRD	4.17. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Umum Penyelenggaraan Pemerintah

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD

Tujuan merupakan target kualitatif instansi/organisasi, sehingga pencapaiannya dapat diukur berdasarkan faktor-faktor kunci keberhasilan instansi/organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit dari pada misi dan mengarah ke suatu titik terang pencapaian hasil, dengan adanya pernyataan tujuan yang ditetapkan, maka akan jelas bagi instansi/organisasi arah



yang akan dicapai dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu dalam upaya menjabarkan visi dan misi instansi/organisasi Sekretariat DPRD menetapkan tujuan : “ ***Meningkatnya Kinerja Fasilitas Sekretariat DPRD Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Tangerang***”

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang diperoleh secara terukur dan nyata akan dicapai dalam setiap tahun. Sasaran merupakan bagian internal dari perencanaan strategis SKPD bersifat spesifik, dapat diukur ketercapaiannya dengan berorientasi pada hasil untuk akhir periode, dari tujuan yang ditetapkan Sekretariat DPRD menetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Fasilitas Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

Indikator sasaran Prosentase hasil pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD tepat waktu

2. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang.

Indikator sasaran nilai evaluasi AKIP

Strategi dan Kebijakan Sekretariat DPRD

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program - program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi sebagai landasan tindak lanjut untuk merespon isu strategis sebagai suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan.

Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Fasilitas Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Tangerang melalui strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan fasilitas persidangan dan rapat-rapat DPRD yang tepat waktu.
2. Peningkatan fasilitas pembahasan produk hukum daerah.
3. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD.
4. Peningkatan pelaksanaan reses pimpinan dan anggota DPRD tepat waktu



Sasaran Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang melalui strategi sebagai berikut : *Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Aparatur Sekretariat DPRD.*

Kebijakan.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi.

Berdasarkan strategi yang telah ditetapkan maka kebijakan yang akan diambil oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang adalah :

1. Strategi Peningkatan fasilitasi persidangan dan rapat-rapat DPRD yang tepat waktu.
Guna mendukung pencapaian target strategi yang optimal, maka langkah kebijakan yang akan dilakukan adalah dengan :
 - Menyusun prosedur kerja dan rapat-rapat DPRD
2. Strategi Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
Guna mendukung pencapaian target strategi yang optimal, maka langkah kebijakan yang akan dilakukan adalah :
 - Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota melalui pendalaman tugas dan study banding
3. Strategi Peningkatan pelaksanaan reses pimpinan dan anggota DPRD tepat waktu.
Guna mendukung pencapaian target strategi yang optimal, maka langkah kebijakan yang akan dilakukan adalah
 - Peningkatan pokok-pokok pikiran sebagai usulan pembangunan daerah.
 - Peningkatan pokok-pokok pikiran dalam implementasi kemajuan pembangunan daerah.



4. Strategis Peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang.

Guna mendukung pencapaian target strategi yang optimal, maka langkah kebijakan yang akan dilakukan adalah dengan :

- Peningkatan profesionalisme kerja melalui bimtek fungsional dan teknis, peningkatan disiplin aparatur serta peningkatan tata kelola perencanaan dan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel.

Secara lebih rinci keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kinerja Fasilitasi Sekretariat DPRD Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Tangerang	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Fasilitasi Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Peningkatan fasilitasi persidangan dan rapat-rapat DPRD yang tepat waktu	Peningkatan fasilitasi persidangan dan rapat-rapat DPRD yang tepat waktu
		Peningkatan fasilitasi pembahasan produk hukum daerah	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur Sekretariat DPRD
		Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
		Peningkatan pelaksanaan reses pimpinan dan anggota DPRD tepat waktu	Peningkatan pelaksanaan reses pimpinan dan anggota DPRD tepat waktu
	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang	Peningkatan tata kelola keuangan di Sekretariat DPRD	Peningkatan tata kelola perencanaan dan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel.

Memperhatikan hal tersebut diatas serta berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2019-2023 yang telah ditetapkan, bahwa Sekretariat DPRD selama kurun waktu 5 tahun kedepan telah menetapkan 3 tujuan sebagai berikut :



1. Peningkatan Kinerja Fasilitas Sekretariat DPRD melalui profesionalisme Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang.
2. Peningkatan hasil laporan kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD yang akuntabel.
3. Meningkatkan produk hukum daerah yang dihasilkan DPRD.
4. Penyelenggaraan pengawasan dan penganggaran pemerintah daerah.

Dari 3 tujuan tersebut ditetapkan 3 sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Tangerang.
2. Mendorong perencanaan dan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
3. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang.
4. Peningkatan Pengawasan dan Penganggaran Pemerintah Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2023 merupakan implementasi dari pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2019–2023. Program-program yang disusun dalam Rencana Kerja ini merupakan penerapan dari Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan dengan Permendagri Nomor 050 Tahun 2020 yang diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Perpres 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang sebagai upaya yang dilaksanakan dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan.

Dengan tetap berpedoman kepada Rencana Strategis organisasi yang telah disepakati, maka untuk Tahun Anggaran 2023 Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang berpedoman pada Permendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 menetapkan 2 Program yaitu



Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan 9 kegiatan yang meliputi 29 sub kegiatan dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan 8 kegiatan yang meliputi 31 sub kegiatan sebagai berikut :

- ❖ Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas dari 9 kegiatan dengan 29 sub kegiatan, sebagai berikut :
 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah, diarahkan pada sub kegiatan :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-PD.
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-PD.
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-PD.
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-PD.
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD.
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, diarahkan pada sub kegiatan :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun PD.
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran
 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, diarahkan pada sub kegiatan :
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah, diarahkan pada sub kegiatan :
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.



- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu.
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD.
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, diarahkan pada sub kegiatan :
- Pengadaan Mebel.
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, diarahkan pada sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, diarahkan pada sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - Pemeliharaan Mebel.
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
8. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD, diarahkan pada sub kegiatan :
- Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD.
 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
 - Pelaksanaan Medical Check Up DPRD.
9. Layanan Administrasi DPRD, diarahkan pada sub kegiatan :
- Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD.



- ❖ Program Dukungan Tugas dan Fungsi DPRD, terdiri atas dari 8 kegiatan dengan 31 sub kegiatan, sebagai berikut :
1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, diarahkan pada sub kegiatan :
 - Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah.
 - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.
 - Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik.
 - Penyusunan Tata Tertib DPRD.
 2. Pembahasan Kebijakan Anggaran, diarahkan pada sub kegiatan :
 - Pembahasan KUA dan PPAS.
 - Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS.
 - Pembahasan APBD.
 - Pembahasan APBD Perubahan.
 - Pembahasan Laporan Semester.
 - Pembahasan Pertanggungjawaban APBD.
 3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, diarahkan pada sub kegiatan :
 - Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum.
 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur.
 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat.
 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian.
 - Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
 - Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
 4. Peningkatan Kapasitas DPRD, diarahkan pada sub kegiatan :
 - Pendalaman Tugas DPRD.
 - Publikasi dan Dokumentasi Dewan.



- Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli.
 - Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi.
 - Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat.
 - Penyusunan Program Kerja DPRD.
5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, diarahkan pada sub kegiatan :
- Kunjungan Kerja dalam Daerah.
 - Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD.
 - Pelaksanaan Reses.
6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD, diarahkan pada sub kegiatan :
- Penyusunan Kode Etik DPRD.
7. Pembahasan Kerja Sama Daerah, diarahkan pada sub kegiatan :
- Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi,
8. Fasilitasi Tugas DPRD, diarahkan pada sub kegiatan :
- Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD.
 - Penyusunan Laporan Kinerja.
 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah.
 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus.

Program dan kegiatan seperti tercantum diatas merupakan estimasi kegiatan untuk Tahun 2023 yang mengacu pada Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021. Program, kegiatan dan sub kegiatan dimungkinkan akan mengalami perubahan apabila dirasa dapat mengakomodir fasilitasi kegiatan DPRD dan disesuaikan dengan kebutuhan Sekretariat DPRD. Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2023 dan perkiraan maju Tahun 2024 dapat dilihat seperti tabel berikut :



Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SKPD Tahun 2023
Dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kode	Unsur Pendukung Urusan Pemerintah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatang Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase pemenuhan administrasi kepegawaian dan umum			77.409.270259				94.552.353.018
		Prosentase pemenuhan administrasi dan program							
	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan			135.844.410				157.993.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 dokumen	64.467.450			3 dokumen	72.816.500
	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 dokumen	18.737.176			1 dokumen	11.785.000
	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	11.063.710			1 Dokumen	12.835.000
	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 dokumen	19.943.910			1 dokumen	12.932.000
	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan		1 dokumen	11.507.700			1 dokumen	11.785.000



				Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD						
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	10.124.464			1 dokumen	35.839.500
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen laporan keuangan		11.176.124.136				11.106.135.040
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 dokumen	11.167.529.136			1 dokumen	11.047.560.540
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	8.595.000			1 dokumen	26.134.500
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 dokumen	-			1 dokumen	32.440.000
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang di fasilitas		517.548.000				1.103.001.200
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	70 stel	150.948.000			70 stel	503.888.700
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	52 orang	366.600.000			52 orang	599.112.500
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Kegiatan administrasi umum perangkat daerah		12.783.317.100				20.322.970.790
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 jenis	75.007.400			1 jenis	128.086.500
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 jenis	526.091.700			7 jenis	2.525.969.200



			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 jenis	252.046.000			7 jenis	375.039.200
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 jenis	250.071.400			3 jenis	250.070.500
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4 jenis	150.500.000			4 jenis	562.149.000
			Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5000 dus	894.750.000			5000 dus	510.060.000
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	88 kali	10.634.850.600			88 kali	15.379.122.000
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang milik daerah yang diadakan		96.291.700				2.340.763.700
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 unit	96.291.700			5 unit	2.340.763.700
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang urusan Pemerintah daerah		545.700.000				551.100.000
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	60.000.000			12 bulan	60.000.000
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan	485.700.000			12 bulan	491.100.000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.661.043.600				4.218.594.636
			Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 item	734.442.000			4 item	688.199.636
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 unit	56.000.000			5 unit	56.400.000
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 item	143.310.000			15 item	178.200.000



			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	477.503.600			1 unit	2.837.859.000
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 unit	249.788.000			25 unit	457.936.000
			Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		44.510.323.536				51.650.262.252
			Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50 orang	42.933.342.736			50 orang	49.628.187.302
			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	200 paket	1.398.215.000			200 paket	1.827.067.000
			Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	50 orang	178.765.800			50 orang	195.007.950
			Layanan Administrasi DPRD	Persentase pemenuhan rapat-rapat DPRD		1.957.336.000				1.847.245.200
			Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Terlaksananya fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	95 kali	1.957.336.000			95 kali	1.847.245.200
			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase pemenuhan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD		51.662.652.000				61.528.140.401
			Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Terlaksananya Pembentukan Peraturan daerah dan Peraturan DPRD Presentase Pemenuhan Pembentukan Peraturan daerah dan Peraturan DPRD		3.718.852.500				2.562.473.000
			Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	2 kegiatan	454.369.400			2 kegiatan	430.332.000
			Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	16 perda	2.519.882.000			16 perda	1.639.452.000
			Fasilitasi Penyusunan Pejelasan/ Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Pejelasan atau Keterangan dan/ atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	8 dokumen	710.743.000			8 dokumen	420.000.000



			Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 dokumen	33.858.100			1 dokumen	72.689.000
			Pembahasan Kebijakan Anggaran	Prosentase Pemenuhan pembahasan Kebijakan Anggaran Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran		979.272.000				1.001.784.000
			Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 kali	156.702.400			1 kali	156.345.000
			Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 kali	156.702.400			1 kali	180.285.000
			Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 kali	156.702.400			1 kali	180.285.000
			Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 kali	156.702.400			1 kali	180.285.000
			Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	2 kali	76.060,000			2 kali	148.239.000
			Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggung jawaban APBD	1 kali	276.402.400			1 kali	156.345.000
			Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Prosentase Pemenuhan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Terselenggaranya Pengawasan Kinerja Pemerintahan		1.710.576.000				1.822.542.500
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	4 kali	332.592.000			4 kali	324.212.000
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	4 kali	323.016.000			4 kali	331.702.000
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	4 kali	323.016.000			4 kali	332.953.600
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	4 kali	332.592.000			4 kali	326.695.600



			Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	2 kali	123.540.000			2 kali	228.440.000
			Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah	1 kali	275.820.000			1 kali	278.539.300
			Peningkatan Kapasitas DPRD	Prosentase Pemenuhan Peningkatan kapasitas DPRD Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD		9.033.934.600				10.807.454.040
			Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 kali	1.635.000.000			6 kali	2.561.301.000
			Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	12 bulan	2.124.680.000			12 bulan	1.963.379.640
			Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	3 orang	370.600.000			3 orang	313.629.000
			Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	12 bulan	792.240.000			12 bulan	816.038.400
			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	100 kali	4.053.516.600			100 kali	5.029.446.000
			Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 dokumen	57.898.000			1 dokumen	123.660.000
			Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Prosentase Pelaksanaan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		8.660.200.000				8.549.537.500
			Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	3 kali	631.425.000			3 kali	213.125.000
			Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	3 kali	56.005.000			3 kali	18.928.500
			Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 kali	7.972.770.000			3 kali	8.317.484.000
			Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase pemenuhan dokumen kode etik		28.123.100				40.459.250
			Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 dokumen	28.124.500			1 dokumen	40.459.250



			Pembahasan Kerja Sama Daerah	Prosentase Pemenuhan Komunikasi dan Publikasi Terlaksananya Komunikasi dan Publikasi			199.980.000			221.639.840
			Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	12 bulan		199.980.000		12 bulan	221.639.840
			Fasilitasi Tugas DPRD	Prosentase Pemenuhan Fasilitasi Tugas DPRD Terlaksananya Fasilitasi Tugas DPRD			28.446.874.650			36.522.250.271
			Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	95 kali		27.995.488.000		95 kali	36.153.149.071
			Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 dokumen		40.542.400		1 dokumen	86.691.800
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	48 kali/ dokumen		122.640.000		48 kali/ dokumen	66.542.400
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	2 kali/ dokumen		288.204.250		2 kali/ dokumen	215.867.000



4.3. Target Kinerja Program dan Kegiatan

Sebagaimana termuat dalam penyusunan rencana kerja yang mengisyaratkan adanya perbaikan dalam pencapaian hasil dari program dan kegiatan, sebagai bahan evaluasi, mampu memperbaiki kinerja jajaran Sekretariat DPRD dan juga menjadi tolok ukur secara objektif sesuai dengan indikator yang telah ditentukan, maka untuk Tahun 2023 dengan memperhatikan hasil pencapaian realisasi program dan kegiatan Tahun 2021 yang termuat dalam monev serta dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, maka perkiraan/estimasi target kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel : 3.4
Target Program dan Kegiatan 2023

No.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Realisasi	
		Fisik (%)	Keu (%)
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	90	81,07
	- Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	100	81,55
	- Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	100	81,55
	- Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	100	81,55
	- Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	100	81,55
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	88,42
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	88,75
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100	90,15
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
	- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	92,00	90,70
	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	91,90	88,15
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	90,00	84,24
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	87,71	87,15



	-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	75,40	71,25
	-	Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan	100	89,45
	-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100	89,66
	-	Fasilitasi Kunjungan Tamu	82,22	75,90
	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	91,00	77,54
5.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	-	Pengadaan Mebel	70,00	64,81
6.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	94,22
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	95,40
7.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100	77,80
	-	Pemeliharaan rutin/berkala Meubelair	100	75,25
	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70,65	68,95
	-	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100	94,25
	-	Pemeliharaan atau Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100	88,60
8.		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		
	-	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	100	92,62
	-	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	50	44,10
9.		Layanan Administrasi DPRD		
	-	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	90,15	88,80
II.		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		
1.		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		
	-	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	85	82,25
	-	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	91	82,76
	-	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	84	80,35
	-	Penyusunan Tata Tertib DPRD	75	72,85



2.	Pembahasan Kebijakan Anggaran			
	-	Pembahasan KUA dan PPAS	100	95,15
	-	Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	100	95,40
	-	Pembahasan APBD	100	95,70
	-	Pembahasan APBD Perubahan	100	95,40
	-	Pembahasan Laporan Semester	60	55,38
	-	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	100	93,80
3.	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			
	-	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Dan Hukum	85,65	82,40
	-	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	85,65	82,40
	-	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	85,65	82,40
	-	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	85,65	82,40
	-	Pengawasan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan pemeriksan Keuangan	75,35	72,47
4.	Peningkatan Kapasitas DPRD			
	-	Pendalaman Tugas DPRD	85,75	81,40
	-	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	91,00	89,55
	-	Penyediaan kelompok Pakar dan Tim Ahli	70,40	66,90
	-	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	100	90,80
	-	Penyelenggaran Hubungan Masyarakat	91,00	83,26
	-	Penyusunan Program Kerja DPRD	100	93,20
5.	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			
	-	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	55,70	50,80
	-	Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	57,00	55,60
	-	Pelaksanaan Reses	100	92,50
6.	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD			
	-	Penyusunan Kode Etik DPRD	75	72,85
7.	Pembahasan Kerja Sama Daerah			
	-	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	84,50	80,42
8.	Fasilitasi Tugas DPRD			
	-	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	90,00	87,05



-	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	85,00	82,70
-	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	90,15	88,75
-	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	70,35	68,60

Rencana Tindak Pengendalian

Program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2023 yang dikelola oleh seluruh Bagian sesuai rencana yang telah ditentukan diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan melibatkan seluruh pegawai yang ada dan melibatkan bagian-bagian lainnya dalam rangka koordinasi, penyesuaian data informasi, pembahasan dan penyusunan. Selain itu ada beberapa kegiatan yang melibatkan para anggota DPRD pada saat pembahasan dan penyusunannya melalui panitia khusus atau pansus DPRD sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangannya.

Namun demikian kerap kali dalam proses pelaksanaan terdapat hambatan, kendala, masalah yang harus dicermati agar program dan kegiatan tetap berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Tabel 3.5

Rencana Tindak Pengendalian

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Resiko		Penyebab		C/UC	Dampak
		Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Data penyusunan, rencana kerja dan anggaran	Bagian Keuangan	Kesiapan data, koordinasi dan komunikasi	Internal/ semua bagian/ eksternal	C	
	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Data penyusunan, rencana kerja dan anggaran	Bagian Keuangan	Kesiapan data, koordinasi dan komunikasi	Internal/ semua bagian/ eksternal	C	
	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Data penyusunan, rencana kerja dan anggaran	Bagian Keuangan	Kesiapan data, koordinasi dan komunikasi	Internal/ semua bagian/ eksternal	C	
	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Data penyusunan, rencana kerja dan anggaran	Bagian Keuangan	Kesiapan data, koordinasi dan komunikasi	Internal/ semua bagian/ eksternal	C	
	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Data penyusunan, rencana kerja dan anggaran	Bagian Keuangan	Kesiapan data, koordinasi dan komunikasi	Internal/ semua	C	



					bagian/ eksternal		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Data penyusunan, data kinerja, informasi PD	Bagian Keuangan	Kesiapan data, koordinasi dan komunikasi	Internal / eksternal	C	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sumber anggaran, informasi ASN	Bagian Keuangan	Pagu anggaran, kesiapan data ASN	Internal	C	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Realisasi anggaran, estimasi kebutuhan, koordinasi	Bagian Keuangan	Data realisasi, perhitungan kebutuhan, koordinasi	Internal	C	
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
	Pengadaan Pakaian dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Proses ULP, Waktu dan penunjukan lelang	Bagian Umum	Komunikasi, waktu dan ketersediaan	Internal / eksternal	C	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Undangan, waktu, koordinasi	Bagian Umum	Undangan, waktu, koordinasi	Internal / eksternal	C	
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah						
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kerusakan, ketersediaan komponen	Bagian Umum	Komunikasi dan ketersediaan	Internal	C	
	Penyediaan Peralatan Kantor	Ketersediaan dan pemeliharaan	Bagian Umum	Komunikasi dan ketersediaan	Internal	C	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Ketersediaan, pemeliharaan	Bagian Umum	Komunikasi dan ketersediaan	Internal	C	
	Pengadaan Barang Cetak dan Penggunaan	Ketersediaan, pemesanan, proses penunjukan	Bagian Umum	Komunikasi, waktu dan ketersediaan	Internal / eksternal	C	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Aturan terbaru, ketersediaan dan waktu	Bagian Umum	Komunikasi, waktu dan koordinasi	Internal / eksternal	C	
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Waktu, adanya kunjungan, jamuan tamu	Bagian Umum	Komunikasi, waktu dan kunjungan kerja	Internal / eksternal	C	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Undangan, agenda Banmus, waktu pelaksanaan	Bagian Umum	Koordinasi, Komunikasi, hasil Banmus	Internal / eksternal	C	
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
	Pengadaan Mebel	Ketersediaan dan pemeliharaan	Bagian Umum	Kerusakan, penggantian	Internal	C	
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Ketersediaan, pembayaran, pemeliharaan	Bagian Umum	Komunikasi, ketersediaan	Internal	C	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Anggaran, kebersihan, Pemeliharaan	Bagian Umum	Sumber daya, komunikasi	Internal	C	
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Ketersediaan, waktu pajak, koordinasi	Bagian Umum	Koordinasi, pemeliharaan	Internal / eksternal	C	



	Pemeliharaan mebel	Ketersediaan, waktu, perawatan	Bagian Umum	Komunikasi dan pelaksanaan	Internal / eksternal	C	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Ketersediaan, waktu dan pemeliharaan	Bagian Umum	Komunikasi dan pelaksanaan	Internal / eksternal	C	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Ketersediaan, kebersihan, pemeliharaan	Bagian Umum	Komunikasi, waktu dan sumber daya	Internal / eksternal	C	
	Pemeliharaan atau Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Ketersediaan, kebersihan, pemeliharaan	Bagian Umum	Komunikasi, waktu dan sumber daya	Internal / eksternal	C	
8.	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD						
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Sumber daya, Stakeholder, sumber anggaran	Bagian Umum	Waktu, ketersediaan	Internal	C	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Sumber daya, Stakeholder, sumber anggaran	Bagian Umum	Waktu, ketersediaan	Internal / eksternal	C	
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Sumber daya, Stakeholder, sumber anggaran	Bagian Umum	Koordinasi, Komunikasi, waktu	Internal / eksternal	C	
9.	Layanan Administrasi DPRD						
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Hasil Banmus, waktu, sumber daya	Bagian Umum	Komunikasi, waktu, sumber daya, pembinaan	Internal / eksternal	C	
II.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD						
1.	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD						
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Banmus, data raperda, waktu, pansus	Bagian Persidangan	Koordinasi, Komunikasi, sumber data	Internal / eksternal	C	
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Banmus, data raperda, waktu, pansus	Bagian Persidangan	Koordinasi, Komunikasi, sumber data	Internal / eksternal	C	
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/ atau Naskah Akademik	Banmus, data raperda, waktu, pansus	Bagian Persidangan	Koordinasi, Komunikasi, sumber data	Internal / eksternal	C	
	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Banmus, aturan, waktu, pansus	Bagian Persidangan	Aturan, waktu, pansus	Internal	C	
2.	Pembahasan Kebijakan Anggaran						
	Pembahasan KUA dan PPAS	Banmus, RKPD, waktu ban ang	Bagian Persidangan	Koordinasi, waktu, RKPD	Internal / eksternal	C	
	Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	Banmus, RKPD, waktu ban ang	Bagian Persidangan	Koordinasi, waktu, RKPD	Internal / eksternal	C	
	Pembahasan APBD	Banmus, RKPD, waktu ban ang	Bagian Persidangan	Komunikasi, waktu, data anggaran	Internal / eksternal	C	
	Pembahasan APBD Perubahan	Banmus, RKPD, waktu ban ang	Bagian Persidangan	Komunikasi, waktu, data anggaran	Internal / eksternal	C	
	Pembahasan Laporan Semester	Koordinasi, data realisasi, waktu	Bagian Persidangan	Koordinasi, waktu, data keuangan	Semua bagian	C	
	Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD	Banmus, waktu, mitra kerja	Bagian Persidangan	Koordinasi, waktu, realisasi keuangan	Internal / eksternal		
3.	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan						



	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Dan Hukum	Banmus, waktu, pelaksanaan, mitra kerja	Bagian Garwas	Koordinasi, pelaksanaan, mitra kerja	Internal / eksternal	C	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Banmus, waktu, pelaksanaan, mitra kerja	Bagian Garwas	Koordinasi, pelaksanaan, mitra kerja	Internal / eksternal	C	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Banmus, waktu, pelaksanaan, mitra kerja	Bagian Garwas	Koordinasi, pelaksanaan, mitra kerja	Internal / eksternal	C	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Banmus, waktu, pelaksanaan, mitra kerja	Bagian Garwas	Koordinasi, pelaksanaan, mitra kerja	Internal / eksternal	C	
	Pengawasan Tindakan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Mitra kerja, waktu, laporan keuangan, mitra kerja	Bagian Garwas	Koordinasi, waktu, mitra kerja	Internal / eksternal	C	
4.	Peningkatan Kapasitas DPRD						
	Pendalaman Tugas DPRD	Banmus, sumber daya, stakeholder	Bagian Garwas	Komunikasi, waktu dan pelaksanaan	Internal / eksternal	C	
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Data kegiatan, media, waktu	Bagian Garwas	Komunikasi, waktu, media	Internal	C	
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Banmus, sumber daya, stakeholder, anggaran	Bagian Garwas	Komunikasi, waktu, sumber daya	Internal	C	
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Regulasi, sumber daya, waktu, laporan	Bagian Garwas	Komunikasi, sumber daya, waktu	Internal	C	
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Sumber daya, stakeholder, waktu	Bagian Garwas	Komunikasi, sumber daya waktu	Internal / eksternal	C	
	Penyusunan Program Kerja DPRD	Banmus, rencana kerja, waktu, sumber anggaran	Bagian Garwas	Komunikasi, waktu, rencana kerja	Internal	C	
5.	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat						
	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Banmus, sumber daya, pelaporan	Bagian Garwas	Komunikasi, waktu, laporan	Internal	C	
	Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	Reses, data, stakeholder	Bagian Garwas	Komunikasi, waktu, laporan	Internal		
	Pelaksanaan Reses	Reses, data, stakeholder	Bagian Garwas	Komunikasi, waktu, laporan	Internal / eksternal		
6.	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD						
	Penyusunan Kode Etik DPRD	Banmus, aturan, waktu, pansus	Bagian Garwas	Komunikasi, waktu, aturan	Internal	C	
7.	Pembahasan Kerja Sama Daerah						
	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Komunikasi, data kegiatan, waktu,	Bagian Pesidangan	Komunikasi, data kegiatan	Internal / eksternal	C	
8.	Fasilitasi Tugas DPRD						
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Banmus, tujuan, waktu, laporan	Bagian Pesidangan	Koordinasi, waktu, laporan	Internal / eksternal	C	
	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Banmus, data kinerja, waktu	Bagian Pesidangan	Koordinasi, waktu, laporan	Internal / eksternal	C	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Kinerja, mitra kerja, waktu	Bagian Pesidangan	Koordinasi, waktu, laporan	Internal / eksternal	C	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Kinerja, mitra kerja, waktu	Bagian Pesidangan	Koordinasi, waktu, laporan	Internal / eksternal	C	



Perjanjian Kinerja

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap satuan kerja perangkat daerah untuk membuat perjanjian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Perjanjian kinerja tersebut dimasukan dalam penyusunan rencana kerja yang berorientasi kepada hasil dan laporan akuntabilitas kinerja satuan kerja perangkat daerah yang akan direviu oleh Inspektorat Wilayah.

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 serta memperhatikan arahan dari Inspektorat Wilayah Kabupaten Tangerang, Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang membuat perjanjian kinerja sebagaimana dibawah ini :

PERJANJIAN KINERJA

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANGERANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NENENG ALMIRAH, SE

Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Tangerang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : A. ZAKI ISKANDAR

Jabatan : Bupati Tangerang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.



Tigaraksa,2023.

Menyetujui,
Bupati Tangerang/Sekretaris Daerah
Kabupaten Tangerang

Sekretaris DPRD
Kabupaten Tangerang

Perjanjian kinerja seperti tersebut diatas berlaku pula untuk jabatan struktural dilingkup Sekretariat DPRD, secara berjenjang membuat perjanjian kinerja dari eselon III kepada eselon II dan eselon IV kepada eselon III.

Pada lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 perjanjian kerja yang dibuat disertai dengan lampiran perjanjian kinerja sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANGERANG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.	Terlaksananya pembahasan pra raperda Tersedianya perda Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan dan/atau Naskah Akademik Tersedianya tata tertib DPRD Jumlah rapat pembahasan KUA PPAS Jumlah rapat pembahasan perubahan KUA dan perubahan PPAS Jumlah rapat pembahasan APBD Jumlah rapat pembahasan perubahan APBD Jumlah rapat pembahasan laporan semesteran Jumlah rapat pembahasan pertanggung jawaban APBD	2 keg 16 perda 8 dok 1 dok 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 2 kali 1 kali



			Jumlah rapat pengawasan bidang pemerintahan dan hukum	4 kali
			Jumlah rapat pengawasan bidang infrastruktur	4 kali
			Jumlah rapat pengawasan bidang kesejahteraan rakyat	4 kali
			Jumlah rapat pengawasan bidang perekonomian	4 kali
			Jumlah rapat pengawasan tindak lanjut pemeriksaan laporan BPK	3 kali
			Terlaksananya kegiatan bimtek	6 kali
			Jumlah publikasi dan dokumentasi	12 bulan
			Terfasilitasinya kegiatan fraksi	12 bulan
			Jumlah hubungan masyarakat yang difasilitasi	100 kali
			Tersusunnya program kerja DPRD	1 dok
			Jumlah laporan kunjungan kerja dalam daerah	50 lap
			Jumlah dokumen pokok-pokok pikiran	50 dok
			Jumlah pelaksanaan reses	3 kali
			Tersedianya kode etik DPRD	1 dok
			Jumlah konferensi pers	12 bulan
			Jumlah koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	95 kali
			Jumlah dokumen laporan kinerja DPRD	1 dok
2.	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang	-	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 dokumen

Dari 2 (dua) sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam program yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 dengan 17 kegiatan dan 60 sub kegiatan yang tersebar pada Bagian Umum, Bagian Pengawasan dan Penganggaran, Bagian Program dan Keuangan dan Bagian Persidangan dan Perundang-undangan. Sasaran strategis yang dijabarkan dalam lebih kurang 60 kegiatan dalam pelaksanaannya memerlukan anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan riil serta akan dihitung dengan mempertimbangkan dinamika yang terjadi serta akan di konsultasikan dan di koordinasikan dengan panitia khusus DPRD dalam pembahasan anggaran Tahun 2023.

**BAB IV****RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Berpedoman pada Peraturan Bupati Tangerang Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang, secara organisatoris dan manajerial Sekretariat DPRD merupakan fasilitator yang menopang seluruh tugas, fungsi dan kewenangan DPRD dalam melaksanakan kegiatan yang dituangkan dalam rencana kerja tahunan DPRD baik bersifat rutinitas maupun terdapat dalam program dan kegiatan yang telah rencanakan. Fasilitasi yang diberikan Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD dilakukan mengacu pada pelayanan prima yaitu pelayanan terbaik dengan memperhatikan kebutuhan yang mampu mendukung kegiatan DPRD sehingga capaian kinerja dengan hasil memuaskan.

Memperhatikan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Pada Tahun Anggaran 2023 Sekretariat DPRD melaksanakan 2 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas 9 kegiatan dengan 31 sub kegiatan dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD terdiri atas 8 kegiatan dengan 29 sub kegiatan

Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat DPRD Tahun 2023, tersebar di 2 Program dan 17 kegiatan, kegiatan dan pendanaan yang dibutuhkan disajikan sebagai berikut :

Tabel 4.1

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2023**

No.	Program/Kegiatan	Jumlah Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket
I	SEKRETARIAT DPRD	17	134.144.654.584	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	9	77.409.270.259	



No.	Program/Kegiatan	Jumlah Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket
	KABUPATEN/KOTA			
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		135.844.410	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		10.482.242.473	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		774.596.733	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		13.677.561.311	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.791.542.324	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		549.256.500	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.590.816.000	
8	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		46.450.267.108	
9	Layanan Administrasi DPRD		1.957.143.400	
2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	8	56.735.384.325	
1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		3.717.448.858	
2	Pembahasan Kebijakan Anggaran		976.905.600	
3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		1.712.138.450	
4	Peningkatan Kapasitas DPRD		9.038.512.552	
5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		8.660.229.200	
6	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		28.743.965	
7	Pembahasan Kerja Sama Daerah		199.980.000	
8	Fasilitasi Tugas DPRD		32.401.425.700	



Tabel 4.2.
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan SKPD Tahun 2023
Perubahan

Kode	Unsur Pendukung Urusan Pemerintah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatang Penting
			Loka si	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase pemenuhan administrasi kepegawaian dan umum			77.409.270259		
		Prosentase pemenuhan administrasi dan program					
	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan			135.844.410		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 dokumen	64.467.450		
	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 dokumen	18.737.176		
	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	11.063.710		
	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 dokumen	19.943.910		
	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 dokumen	11.507.700		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 dokumen	10.124.464		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen laporan keuangan			11.176.124.136		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		1 dokumen	11.167.529.136		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 dokumen	8.595.000		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/		1 dokumen	-		



			Triwulanan/Semesteran SKPD				
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang di fasilitas			517.548.000
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	70 stel		150.948.000
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	52 orang		366.600.000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Kegiatan administrasi umum perangkat daerah			12.783.317.100
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 jenis		75.007.400
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 jenis		526.091.700
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 jenis		252.046.000
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 jenis		250.071.400
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4 jenis		150.500.000
			Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5000 dus		894.750.000
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	88 kali		10.634.850.600
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang milik daerah yang diadakan			96.291.700
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 unit		96.291.700
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang urusan Pemerintah daerah			545.700.000
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan		60.000.000
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan		485.700.000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.661.043.600
			Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 item		734.442.000
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 unit		56.000.000
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 item		143.310.000



Sekretariat DPRD

			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	477.503.600		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 unit	249.788.000		
			Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		44.510.323.536		
			Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50 orang	42.933.342.736		
			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	200 paket	1.398.215.000		
			Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	50 orang	178.765.800		
			Layanan Administrasi DPRD	Persentase pemenuhan rapat-rapat DPRD		1.957.336.000		
			Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Terlaksananya fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	95 kali	1.957.336.000		
			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase pemenuhan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD		51.662.652.000		
			Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Terlaksananya Pembentukan Peraturan daerah dan Peraturan DPRD Prosentase Pemenuhan Pembentukan Peraturan daerah dan Peraturan DPRD		3.718.852.500		
			Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	2 kegiatan	454.369.400		
			Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	16 perda	2.519.882.000		
			Fasilitasi Penyusunan Pejelasan/ Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/ atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	8 dokumen	710.743.000		
			Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 dokumen	33.858.100		
			Pembahasan Kebijakan Anggaran	Prosentase Pemenuhan pembahasan Kebijakan Anggaran Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran		979.272.000		
			Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 kali	156.702.400		
			Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 kali	156.702.400		
			Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 kali	156.702.400		
			Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 kali	156.702.400		
			Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	2 kali	76.060,000		
			Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggung jawaban APBD	1 kali	276.402.400		
			Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Prosentase Pemenuhan Pengawasan Penyelenggaraan		1.710.576.000		



				Pemerintahan Terselenggaranya Pengawasan Kinerja Pemerintahan					
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	4 kali	332.592.000		
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	4 kali	323.016.000		
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	4 kali	323.016.000		
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	4 kali	332.592.000		
				Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	2 kali	123.540.000		
				Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah	1 kali	275.820.000		
				Peningkatan Kapasitas DPRD	Prosentase Pemenuhan Peningkatan kapasitas DPRD Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD		9.033.934.600		
				Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 kali	1.635.000.000		
				Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	12 bulan	2.124.680.000		
				Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	3 orang	370.600.000		
				Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	12 bulan	792.240.000		
				Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	100 kali	4.053.516.600		
				Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 dokumen	57.898.000		
				Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Prosentase Pelaksanaan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		8.660.200.000		
				Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	3 kali	631.425.000		
				Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	3 kali	56.005.000		
				Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 kali	7.972.770.000		
				Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase pemenuhan dokumen kode etik		28.123.100		
				Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Dokumen Kode Etik DPRD yang Disusun	1 dokumen	28.124.500		
				Pembahasan Kerja Sama Daerah	Prosentase Pemenuhan Komunikasi dan Publikasi Terlaksananya Komunikasi dan Publikasi		199.980.000		



Sekretariat DPRD

			Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	12 bulan	199.980.000		
			Fasilitasi Tugas DPRD	Prosentase Pemenuhan Fasilitasi Tugas DPRD Terlaksananya Fasilitasi Tugas DPRD		28.446.874.650		
			Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	95 kali	27.995.488.000		
			Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 dokumen	40.542.400		
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	48 kali/ dokumen	122.640.000		
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	2 kali/ dokumen	288.204.250		



BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2023 merupakan tahun kelima dari pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2019 - 2023, yang disusun secara sinergi dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan tugas pokok, fungsi dan tata kerja organisasi dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi. Rencana Kerja ini merupakan pedoman bagi jajaran organisasi yang berada di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 tahun yang akan datang.

Optimalisasi hasil pelaksanaan kegiatan pencapaian kinerja yang diharapkan, setiap bagian dari organisasi yang secara langsung bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut, dan berkewajiban untuk menuangkan kegiatan tersebut ke dalam bentuk dokumen teknis operasional kegiatan, yaitu Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja (RKA) maupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja (DPA) yang tepat, akurat dan terencana dengan baik.

Selain itu, pada saat kegiatan akan dilaksanakan, setiap pengelola kegiatan maupun penanggung jawab kegiatan perlu melakukan pengendalian secara periodik dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi baik terhadap rencana kegiatan dan rencana anggaran sehingga program dan kegiatan yang akan telah direncanakan dapat terkontrol dari segi waktu pelaksanaan maupun dari segi anggaran. Hal ini perlu dilakukan mengingat kegiatan monitoring merupakan suatu proses manajemen yang tidak terpisahkan dengan fungsi lainnya seperti perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan sedangkan kegiatan evaluasi juga sangat bermanfaat sebagai umpan balik bagi perencanaan yang akan datang.